

Buletin La'ó Hamutuk

Vol. 7, No. 1

April 2006

Perjanjian CMATS

Awal tahun ini, pemerintah Australia dan pemerintah Timor-Leste menandatangani satu perjanjian untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi ladang-ladang minyak dan gas di Laut Timor di luar Joint Petroleum Development Area* (JPDA – Wilayah Pengembangan Minyak Bersama). Perjanjian mengenai Ketentuan Laut Tertentu di Laut Timor (Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea – CMATS), yang di Timor-Leste lebih sering disebut “Perjanjian Sunrise,” membagi penghasilan minyak dan gas dari wilayah-wilayah yang sebelumnya disengketakan (lihat peta 1), tetapi menunda memutuskan negara mana yang memiliki wilayah laut dan dasar laut yang mana. Ini memungkinkan perusahaan-perusahaan internasional maju dengan proyek-proyek minyak dan gas, dan akan memberikan penghasilan tambahan kepada kedua negara, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar mengenai perbatasan laut.

Kedua belah pihak menyelesaikan Perjanjian CMATS pada bulan November 2005, setelah satu putaran yang terdiri dari lebih dua belas perundingan selama dua tahun,

** Istilah-istilah teknis dalam artikel ini dijelaskan dalam satu daftar istilah pada halaman 11, dan istilah-istilah tersebut digarisbawahi ketika pertama kali digunakan.*



Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta dan Menteri Alexander Downer setelah melakukan penandatanganan perjanjian CMATS di Sydney pada tanggal 12 Januari 2006 dengan disaksikan oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri dan John Howard.

dan menandatangani di Sydney pada tanggal 12 Januari 2006. Perjanjian ini menyelesaikan satu sengketa yang berlangsung lama antara kedua pemerintah, setidaknya untuk 50 tahun mendatang. Sekarang Perjanjian ini masih menunggu ratifikasi resmi oleh Parlemen dari kedua negara.

Timor-Leste dan Australia masing-masing akan mendapatkan setengah dari penghasilan hulu (ekstraksi, tetapi bukan pemurnian atau pencairan) dari ladang Greater Sunrise yang besar, yang dua kali lebih dekat ke Timor-Leste daripada Australia. Australia akan mendapatkan semua yang dikeluarkan dari wilayah-wilayah lain Laut Timor sebelah selatan Perbatasan Dasar Laut Australia-Indonesia 1972 dan di luar JPDA tetapi lebih dekat ke Timor-Leste, meliputi Laminaria-Corallina, Buffalo, dan wilayah-wilayah lain yang sedang dieksplorasi sekarang atau di masa mendatang (lihat peta 1). Sebelum CMATS, Timor-Leste memprotes pengembangan Australia atas wilayah-wilayah ini, yang seharusnya menjadi milik Timor-Leste berdasarkan asas hukum internasional yang berlaku sekarang.

Harga-harga minyak jangka panjang sulit diperkirakan dengan tepat, tetapi sebagian perkiraan menyebutkan

(bersambung ke halaman 2)

Daftar isi . . .

Kronologi negosiasi Laut Timor	4
Isi Perjanjian CMATS	8
Pengertian istilah	11
NGO memilih utusannya untuk Dewan Penasehat Dana Perminyakan	13
PM Mari Alkatiri: Haburas ita nia rekursu ba Timor-oan sira hotu nia diak	14
LH Resposta ba Primeiru Ministru nia artigu	16
Garis waktu pengembangan Laut Timor	18
Pozisaun kona-ba situasaun atual Timor-Leste...	19
Berita solidaritas Kuba dari India	20
Pelatihan analisis gender di Yogyakarta	21
Perempuan penghibur pada masa PD II	21
LH Husu Prezidente la promulga lei defamasau ..	22
Editorial: Rekomendasi CAVR	24

La'ó Hamutuk, Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor-Leste

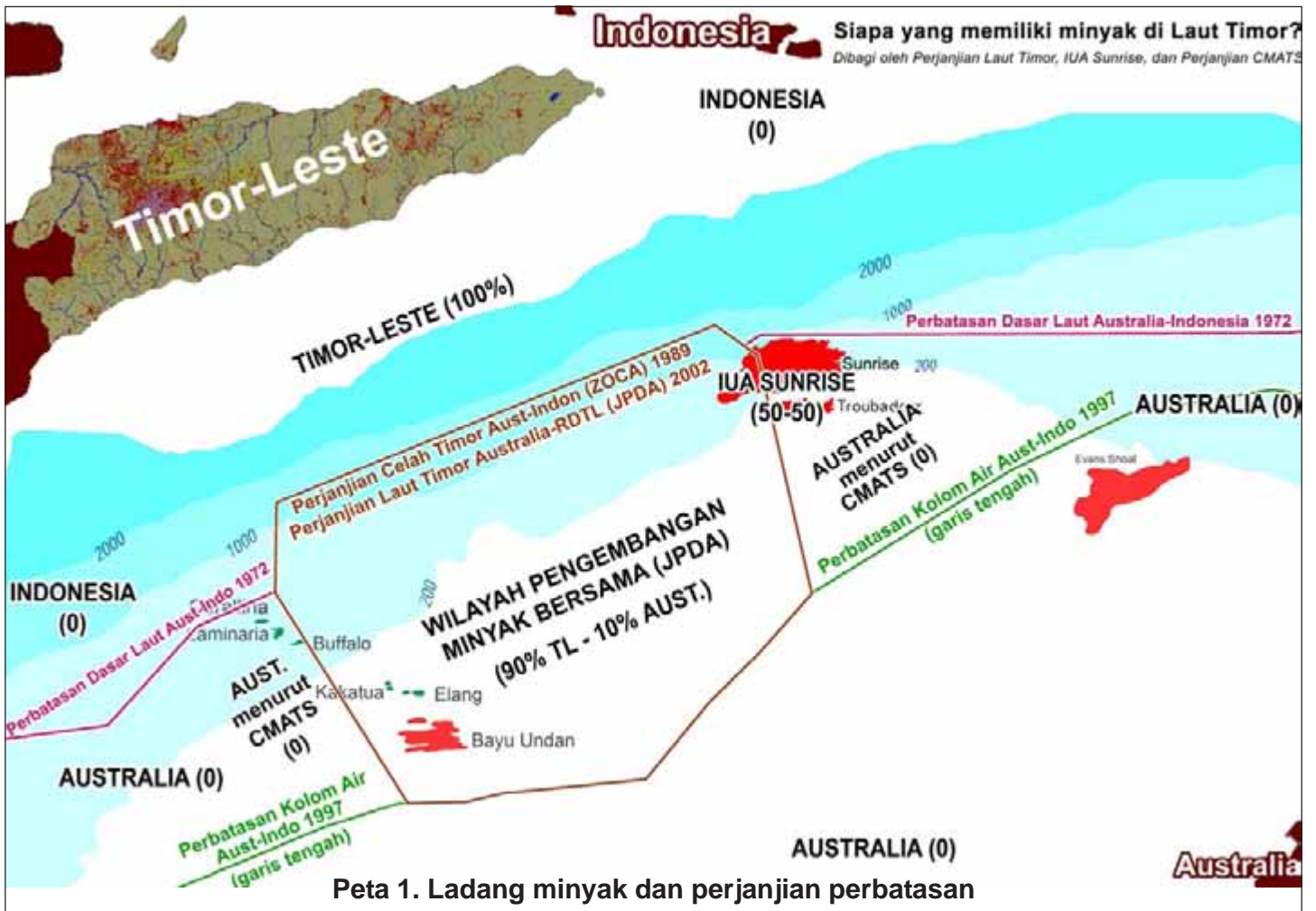
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste

Mobile: +(670)7234330

Email: info@laohamutuk.org

Telepon: +(670)3325013

Situs/Web: www.laohamutuk.org



Peta 1. Ladang minyak dan perjanjian perbatasan

bahwa pemerintah Timor-Leste akan memperoleh US\$ 14 milyar dari ladang Greater Sunrise untuk 40-50 tahun selanjutnya, Australia akan memperoleh sama besarnya atau lebih besar. Walaupun ladang Sunrise telah ditemukan pada tahun 1975, pengembangannya terhenti selama beberapa tahun karena sengketa perbatasan (lihat kronologi halaman 4). Operator Sunrise, Woodside Petroleum menunda semua kerjanya pada akhir 2004, dan menunggu Perjanjian CMATS diratifikasi sebelum melanjutkan proyek ini.

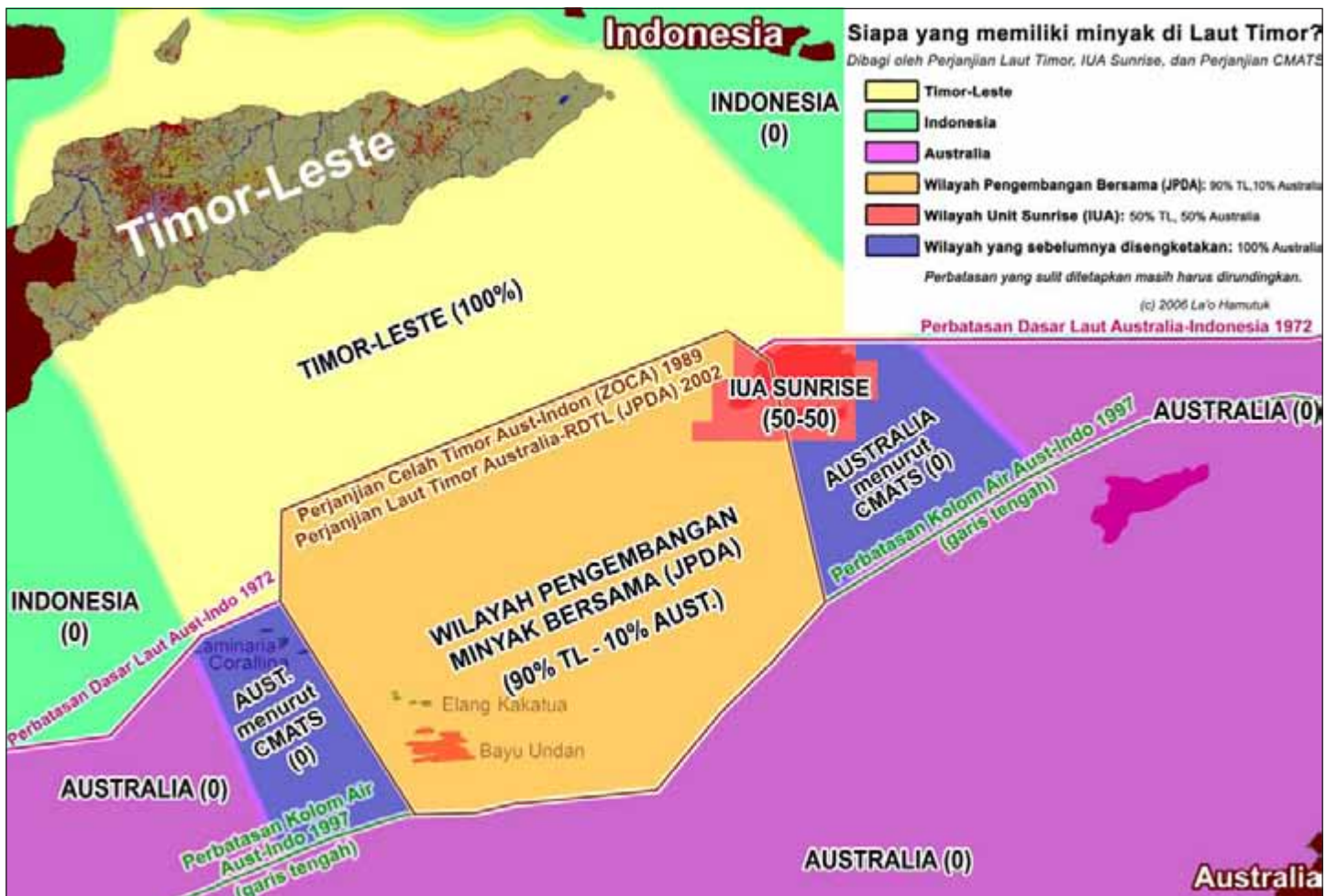
Jika Woodside dan mitra-mitranya (ConocoPhillips, Shell, dan Osaka Gas) memutuskan membangun jalur pipa ke Timor-Leste untuk mencairkan gas Sunrise di sini untuk dikapalkan ke konsumen luar negeri, ini bisa meningkatkan penghasilan dan menaikkan tingkat perekonomian lokal Timor-Leste, membantu mendorong pengembangan ekonomi bangsa ini. Keputusan ini akan dibuat pada beberapa tahun mendatang, dan Timor-Leste dan Wilayah Utara Australia sama aktif mengkampanyekan proyek ini.

Pemerintah Australia dan Timor-Leste memuji Perjanjian CMATS sebagai satu keberhasilan besar. Meskipun pejabat-pejabat Australia mengatakan bahwa perjanjian ini memperlihatkan kebaikan hati Australia kepada tetangganya di utara yang miskin, para pejabat Timor-Leste menyebutkan bahwa Australia juga mendapatkan keuntungan yang besar dari Perjanjian ini, mencakup US\$ 2 milyar pajak penghasilan dari kilang LNG Darwin (untuk Bayu-Undan) dan US\$ 2,5 milyar dari ladang-ladang yang sebelumnya disengketakan. Manuel de Lemos dari

Kantor Laut Timor RDTL mengatakan bahwa “Tidak benar menggolongkan hasil dari perjanjian ini sebagai sikap ‘sangat murah hati’ dari pihak Australia. Sumberdaya yang dipertaruhkan dalam perjanjian-perjanjian ini diklaim berdasarkan hukum internasional.”

Selain pendapatan minyak dan gas, Timor-Leste mengaku bahwa banyak dari kalangan masyarakat sipil percaya bahwa masalah pentingnya adalah kedaulatan nasional, menerima pendudukan maritim ilegal Australia yang merupakan kelanjutan pendudukan brutal Indonesia terhadap wilayah Timor-Leste dengan menunda suatu proses untuk menetapkan perbatasan laut sampai semua minyak dan gas di wilayah yang disengketakan telah habis diambil dan dijual.

Sebagian orang dalam pemerintah Timor-Leste telah mengungkapkan kekhawatiran mengenai kemungkinan campur tangan Indonesia dalam perundingan perbatasan laut dengan Australia, yang bisa merupakan satu faktor dalam penandatanganan suatu perjanjian pada waktu ini. Akan tetapi, Timor-Leste dan Indonesia masih harus menyelesaikan perbatasan laut mereka, dan Perjanjian CMATS (lihat “hak menangkap ikan” halaman 9) meninggalkan beberapa pertanyaan yang terbuka untuk perundingan itu. Lebih jauh, meragukan bahwa Indonesia bisa secara legal melakukan campur tangan dalam perundingan Australia-Timor-Leste, karena Indonesia dan Australia telah menetapkan perbatasan dasar laut pada tahun 1972, dan semua wilayah yang dibahas dengan Australia telah diserahkan oleh Indonesia pada waktu itu.



Peta 2. Perjanjian CMATS membagi wilayah di Laut Timor

La'o Hamutuk telah menulis banyak artikel mengenai pengembangan minyak dan gas Timor-Leste. Tulisan yang sekarang ini memfokuskan pada Perjanjian CMATS dan proses perundingan yang menghasilkannya. Dimulai dengan tinjauan mengenai sejarahnya, kami menguraikan isi perjanjian, diikuti dengan analisis, rekomendasi, dan satu daftar istilah-istilah teknis yang digarisbawahi yang digunakan dalam tulisan ini.

Kesimpulan umum kami adalah bahwa Perjanjian ini merupakan perbaikan dari yang telah siap ditawarkan oleh Australia pada tahun 2002 dan 2003, tetapi mengandung persoalan serius yang kami yakin bisa diatasi dengan melanjutkan perundingan, yang disertai dengan kampanye oleh masyarakat Timor-Leste, Australia, dan di tempat-tempat lain. Kampanye ini telah membuat Australia berubah dalam waktu dua tahun terakhir, dan bisa lebih efektif lagi jika dilanjutkan.

Latar belakang dan sejarah

Timor-Leste adalah negara terbaru di dunia. Kemerdekaan diperoleh melalui satu perjuangan panjang yang mewariskan pada negeri ini sejumlah persoalan, meliputi penetapan kedaulatannya atas darat dan laut. Kedaulatan ini bukan hanya mengenai minyak dan gas, tetapi juga mengenai sumberdaya ekonomi yang lain, keamanan, dan yang paling penting, penentuan wilayah negara. Banyak orang di Timor-Leste yakin bahwa kemerdekaan nasional kita tidak akan lengkap sebelum kedaulatan wilayah kita diterima oleh tetangga-tetangga kita.

Australia telah dan sedang bekerja untuk memperluas aksesnya pada ladang minyak dan gas di Laut Timor milik tetangganya sejak dasawarsa 1970-an, menekan Indonesia dan Timor-Leste untuk menyerahkan wilayah yang seharusnya milik mereka menurut prinsip hukum yang berlaku sekarang, yang menetapkan perbatasan itu di pertengahan antara garis pantai kedua negara. Tetapi bukannya memutuskan sesuai dengan hukum atau melalui penengahan oleh pihak ketiga yang tidak memihak, Australia mendesakkan perundingan bilateral. Ini memungkinkan perbedaan kekuatan ekonomi dan politik dua negara mempengaruhi hasilnya, dan sangat menguntungkan negara yang lebih kuat. Perundingan selama empat tahun terakhir antara Timor-Leste dan Australia memberikan bukti – pemerintah Australia berkali-kali memperlihatkan tidak menghormati kedaulatan nasional tetangganya yang baru merdeka, meskipun rakyat Australia telah sering memprotes sikap congkak pemerintahnya terhadap Timor-Leste.

Sayangnya, Perjanjian CMATS memperpanjang ketidakadilan ini dengan mengharuskan setiap sengketa perjanjian ini diselesaikan melalui perundingan bilateral bukannya melalui proses hukum.

Perjanjian CMATS dihasilkan dari suatu proses diplomatis yang berlangsung lebih dari 30 tahun, dan ini akan berlaku untuk 50 tahun lagi (lihat garis waktu halaman 18). Kronologi ini mencakup peristiwa-peristiwa yang paling penting dalam proses tersebut. (Kronologi yang lebih rinci, sampai akhir tahun 2002, dimuat dalam *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 3, No. 8.)

Kronologi Negosiasi Laut Timor

1970: Australia dan Indonesia mulai mengadakan perundingan mengenai perbatasan dasar laut, tanpa mengindahkan keberatan Portugis bahwa dasar laut hendaknya perbatasannya ditetapkan di tengah antara Timor dan Australia. Australia dan Indonesia menandatangani kesepakatan “Menetapkan Perbatasan Dasar Laut Tertentu” pada tanggal 18 Mei 1971 dan 9 Oktober 1982, yang berlaku pada bulan November 1973. (Peta 1). Perjanjian-perjanjian tersebut didasarkan pada prinsip landas kontinental, yang tidak adil menguntungkan Australia. Karena Portugal tidak mengambil bagian dalam perjanjian ini, kedua negara lainnya tidak bisa menyelesaikan garis antara Timor Portugis dan Australia, sehingga terciptalah “Celah Timor.”

1975: Ladang minyak dan gas Greater Sunrise ditemukan.

7 Desember 1975: Indonesia menyerbu Timor-Leste.

1978: Australia mengakui “fakta” pencaplokan Indonesia atas Timor-Leste.

1979: Australia memberikan pengakuan hukum pada pendudukan Indonesia, yang membuka jalan bagi Australia untuk berunding dengan Indonesia mengenai perbatasan laut untuk menutup Celah Timor. Selama sepuluh tahun selanjutnya, Australia dan Indonesia berusaha merundingkan satu perbatasan dasar laut di sebelah selatan Timor-Leste, menyelenggarakan lebih dari belasan putaran perundingan. Meskipun negar-negara itu tidak bisa bersepakat mengenai perbatasan dasar laut untuk menutup Celah Timor, mereka akhirnya membuat satu pengaturan untuk berbagi pendapatan minyak.

11 Desember 1989: Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Celah Timor di sebuah kapal terbang yang terbang di atas Laut Timor. Perjanjian ini menetapkan satu Zona Kerjasama (ZOC – Zone of Cooperation) antara Timor-Leste dan Australia (kemudian disebut JPDA), di sebelah utara garis tengah. Perjanjian ini menetapkan Indonesia-Australia melakukan eksplorasi bersama pada wilayah yang diduduki secara ilegal itu, dengan pendapatan dibagi 50-50. Perjanjian ini telah diratifikasi dan berlaku mulai tanggal 9 Februari 1991. (Peta 1)

11 Desember 1991: Australia dan Indonesia memberikan kontrak bagi produksi kepada Phillips Petroleum (yang kemudian menjadi ConocoPhillips), Royal Dutch Shell, Woodside Australian Energy (kemudian menjadi Woodside Petroleum), dan perusahaan-perusahaan lain untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber alam di Zona Kerjasama Celah Timor. Kontrak-kontrak terus diberikan, dan eksplorasi berlanjut, sepanjang dasawarsa 1990-an. Beberapa ladang ditemukan pada tahun 1994 dan 1995, dengan produksi dimulai pada 1998 di Elang-Kakatua di dalam JPDA, dan pada 1999 di Laminaria-Corallina tepat di luar ZOC. (Peta 1)

14 Maret 1997: Australia dan Indonesia menandatangani satu perjanjian meliputi perbatasan kolom air tetapi tidak mencakup sumberdaya dasar laut, di bawah prinsip

garis tengah yang ditetapkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut tahun 1982. Karena pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste berakhir, perjanjian ini tidak pernah disahkan.

1999-2001

30 Agustus 1999: Kebanyakan rakyat Timor-Leste memberikan suara menolak integrasi dengan Indonesia.

Oktober 1999: Tujuh perusahaan minyak dipimpin oleh Phillips Petroleum menyepakati pengembangan ladang gas dan minyak Bayu-Undan, di dalam ZOC.

November 1999: Proyek-proyek perusahaan Woodside di Laminaria-Corallina mulai memproduksi minyak. Sejak itu perusahaan-perusahaan mengambil hampir seluruh cadangan, menghasilkan lebih dari US\$ 1,3 milyar untuk pemerintah Australia. Sebagian atau semua pendapatan ini berdasarkan prinsip Hukum Laut PBB adalah milik Timor-Leste. Perjanjian CMATS 2006 menandai berakhirnya protes-protes Timor-Leste mengenai pencurian sumber alamnya ini.

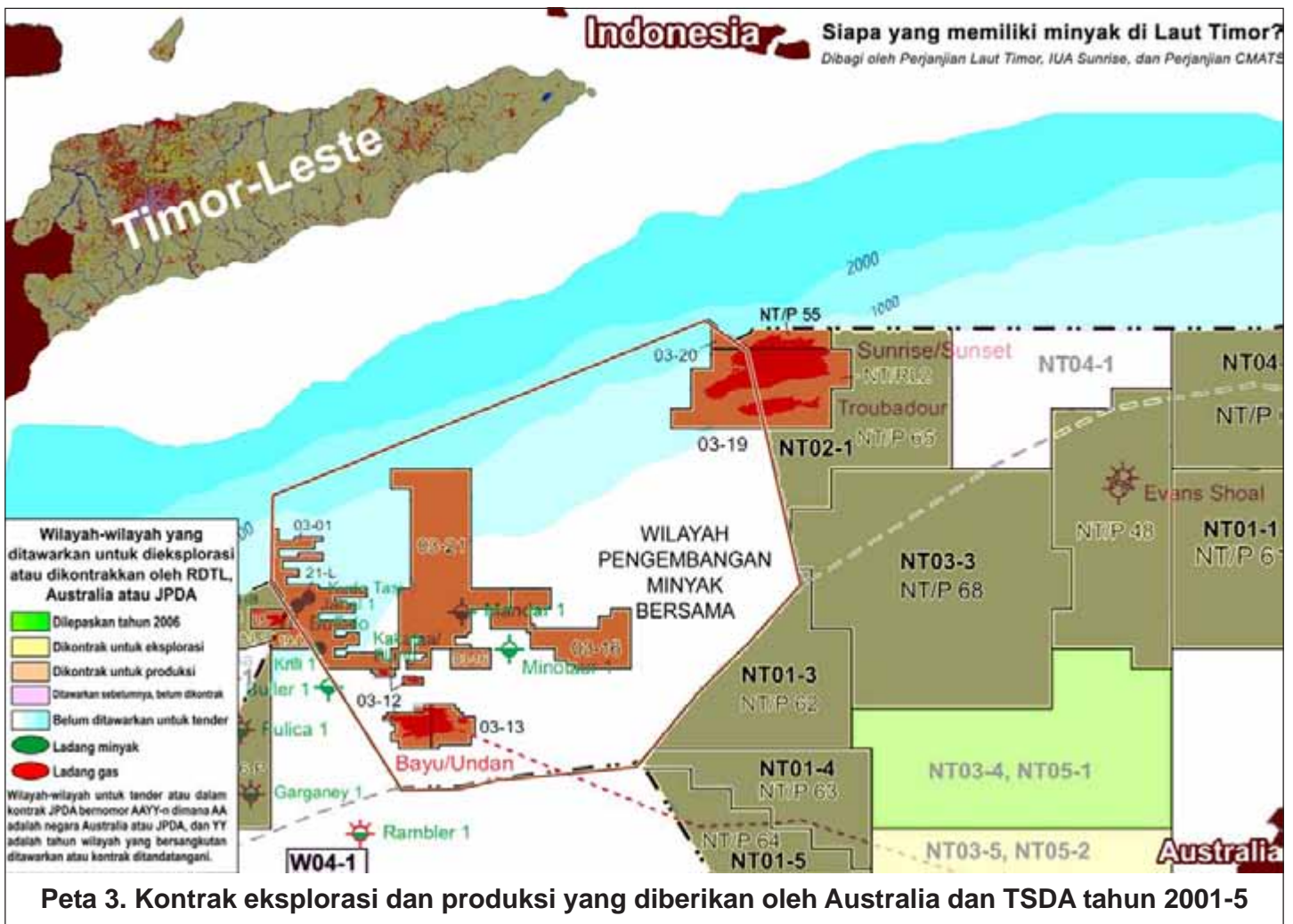
10 Februari 2000: Australia dan UNTAET menandatangani Nota Kesepahaman sementara, untuk melanjutkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Celah Timor Australia-Indonesia tetapi menggantikan Indonesia dengan Timor-Leste. Kesepakatan ini menyebutkan pembagian 50-50 antara Australia dan Timor-Leste produksi minyak dan gas dari Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (yang dinamakan Zona Kerjasama dalam Perjanjian Celah Timor).

Oktober 2000: UNTAET memulai perundingan dengan Australia untuk mendapatkan kesepakatan mengenai pembagian sumber alam Laut Timor untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi tidak mengenai perbatasan laut atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada bulan April 2001 Australia mengulangi lagi bahwa tidak akan merundingkan perbatasan laut resmi di Laut Timor.

5 Juli 2001: UNTAET dan Mari Alkatiri menandatangani Kesepakatan Laut Timor dengan Australia. Menurut Kesepakatan ini, yang menggantikan Nota Kesepahaman Februari 2000, Timor-Leste akan mendapatkan 90% dan Australia 10% dari pendapatan minyak dan gas dari JPDA. JPDA mewarisi ZOC dari Perjanjian Celah Timor 1989, yang hanya mengubah pembagian pendapatan. Ladang gas terbesar, Greater Sunrise, dinyatakan 20% terketak di dalam JPDA dan 80% di dalam wilayah Australia.

2002

21 Maret 2002: Australia secara rahasia menarik diri dari proses internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan laut berdasarkan Hukum Laut (UNCLOS) dan Mahkamah Pengadilan Internasional. Selain memperlihatkan bahwa Canberra mengetahui argumen hukumnya lemah, tindakan ini mencegah Timor-Leste untuk membawa sengketa ini ke penengah pihak ketiga yang tidak memihak, membuatnya terpaksa mengandalkannya pada perundingan-perundingan yang sifat dasarnya tidak setara.



Peta 3. Kontrak eksplorasi dan produksi yang diberikan oleh Australia dan TSDA tahun 2001-5

19 Mei 2002: Kelompok-kelompok masyarakat sipil Timor-Leste dan partai-partai politik oposisi memprotes penandatanganan yang akan dilakukan atas Perjanjian Laut Timor antara Perdana Menteri Timor-Leste Mari Alkatiri dan Perdana Menteri Australia John Howard. Perjanjian CMATS 2006 memberlakukan hukum Timor-Leste (tidak ada) dan hukum Australia yang berlaku pada waktu itu untuk mengesahkan eksploitasi Australia pada wilayah yang disengketakan (lihat “Mengesahkan eksploitasi Australia” di bawah).

19-20 Mei 2002 (tengah malam): Republik Demokratik Timor-Leste menjadi satu negara merdeka.

20 Mei 2002: Perdana Menteri Timor-Leste dan Perdana Menteri Australia menandatangani Perjanjian Laut Timor (Timor Sea Treaty – TST) yang menggantikan Kesepakatan tahun 2001. Substansi dari Kesepakatan tahun 2001 itu terus berlaku, tanpa menyinggung penyelesaian perbatasan laut di masa mendatang yang akan menggantikan perjanjian ini. (Lihat Editorial, *Buletin La’o Hamutuk* Vol. 3, No. 7, Oktober 2002).

19 Juli 2002: Putaran pertama perundingan antara Timor-Leste dan Australia mengenai Kesepakatan Penyatuan Internasional (International Unitization Agreement – IUA) Sunrise diselesaikan dengan kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada akhir tahun 2002. IUA akan menetapkan bagaimana ladang Greater Sunrise, dengan sekitar 9 triliun kaki kubik gas alam, akan dibagi. Australia (sekarang diperkirakan mendapatkan 82% dari pendapatan Sunrise)

menempatkan prioritas yang tinggi pada pencapaian kesepakatan ini sehingga proyek Sunrise bisa berlanjut.

24 Agustus 2002: Timor-Leste mengesahkan satu undang-undang perbatasan laut berdasarkan prinsip UNCLOS, mengklaim satu Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil dari pantai Timor-Leste. Undang-undang ini berlaku surut ke belakang mulai 20 Mei 2002.

20 September 2002: Australia memberikan satu kontrak eksplorasi pada satu wilayah yang sebagian berada pada sisi Timor-Leste dari garis tengah. Kontrak-kontrak yang serupa, yang diprotes oleh Timor-Leste, diberikan pada bulan April 2003 dan Februari 2004. (lihat peta 3).

3 Oktober 2002: Perdana Menteri Timor-Leste Mari Alkatiri menulis surat kepada Perdana Menteri Australia John Howard mengusulkan pembicaraan awal mengenai perbatasan laut. Satu bulan kemudian, Howard menjawab bahwa Australia “bersedia untuk memulai pembicaraan” setelah Perjanjian Laut Timor berlaku dan IUA Sunrise “telah diselesaikan.” Pada tanggal 18 November Alkatiri menulis kembali bahwa ia tidak melihat adanya alasan mengapa perlu “menyelesaikan ketentuan-ketentuan sementara” sebelum pembicaraan mengenai perbatasan dimulai, dan meminta “jadwal waktu yang segera” untuk perundingan perbatasan.

Oktober 2002: Perundingan kesepakatan penyatuan Sunrise dilanjutkan. Australia dan Woodside ingin mengaitkan kesepakatan ini dengan ratifikasi Perjanjian Laut Timor, yang dengan demikian menjadikan proyek

Bayu-Undan (yang terutama menguntungkan Timor-Leste) sandera Australia untuk konsesi sebagian besar pendapatan Timor-Leste dari proyek besar Sunrise.

27 November 2002: Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer, setelah satu rapat yang panas dengan Mari Alkatiri di Dili, mengatakan bahwa Australia tidak akan meratifikasi Perjanjian Laut Timor sampai bulan Februari 2003 atau lebih kemudian, melanggar komitmen kedua pemerintah untuk menyelesaikan ratifikasi pada 2002. Perusahaan-perusahaan minyak mengatakan bahwa penundaan ini bisa membahayakan ketentuan untuk menjual gas dari Bayu-Undan dan Sunrise, menambah tekanan pada pemerintah Australia untuk segera menerima ketentuan penyatuan Sunrise yang secara tidak adil menguntungkan Australia, bukannya mendesak agar perbatasan laut dirundingkan.

6 Desember 2002: Mitra-mitra Sunrise, Woodside, ConocoPhillips, Shell, dan Osaka Gas mengumumkan penundaan tanpa batas waktu proyek Sunrise, mengatakan bahwa kilang pengolahan LNG terapung maupun jalur pipa ke Darwin secara ekonomi tidak layak. Banyak yang memandang ini sebagai satu taktik untuk mendesak Timor-Leste menerima keinginan Australia mengenai Sunrise.

17 Desember 2002: Parlemen Timor-Leste meratifikasi Perjanjian Laut Timor.

2003

26 Januari 2003: Jaringan organisasi solidaritas East Timor Action Network (ETAN) berdemonstrasi di Washington menuntut agar Australia mematuhi hukum internasional. Ini adalah yang pertama dari banyak demonstrasi seperti ini yang dilakukan selama dua setengah tahun selanjutnya.

1 Februari 2003: Australia, menolak penolakan Timor-Leste untuk menyerahkan kedaulatan atas bagian Greater Sunrise yang terletak di luar JPDA, mengatakan bahwa Parlemennya tidak akan mengesahkan Perjanjian Laut Timor sebelum Timor-Leste menyerah dan menandatangani versi usulan Australia mengenai Kesepakatan Penyatuan Internasional Sunrise.

4 Maret 2003: Setelah tidak mendapatkan tanggapan atas suratnya bertanggal 18 November 2002, Mari Alkatiri menulis surat kepada John Howard mengatakan bahwa Perjanjian Laut Timor akan segera berlaku dan IUA sedang disampaikan kepada dewan menteri RDTL. Ia meminta “petunjuk awal tentang tanggal” mengenai “perundingan bisa dimulai, dan satu tanggal yang menurut anda perundingan-perundingan akan menghasilkan suatu penentuan perbatasan tetap.” Lima bulan kemudian, Howard menjawab, mengisyaratkan satu kemauan untuk memulai pembicaraan mengenai perbatasan, tanpa jadwal waktu.

6 Maret 2003: Australia dan Timor-Leste menandatangani Kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA) untuk Greater Sunrise.

6 Maret 2003: Parlemen Australia mengesahkan Perjanjian Laut Timor. Senator dari Partai Hijau Bob Brown dikeluarkan dari Senat karena menuduh John Howard melakukan “pemerasan” dengan menunda pengesahan sampai suatu waktu setelah Timor-Leste menandatangani IUA.

2 April 2003: Perjanjian Laut Timor berlaku, membentuk Timor Sea Designated Authority (TSDA – Otorita Mengenai Laut Timor) satu lembaga dua negara untuk mengelola proyek-proyek di wilayah pengembangan bersama. Ini akan berakhir dalam waktu 30 tahun, atau ketika perbatasan laut ditetapkan, tergantung mana yang lebih dulu.

16 Mei 2003: Australia dan Timor-Leste menyelesaikan perundingan mengenai Kontrak Bagi Produksi dan Rencana Pengembangan untuk Bayu-Undan.

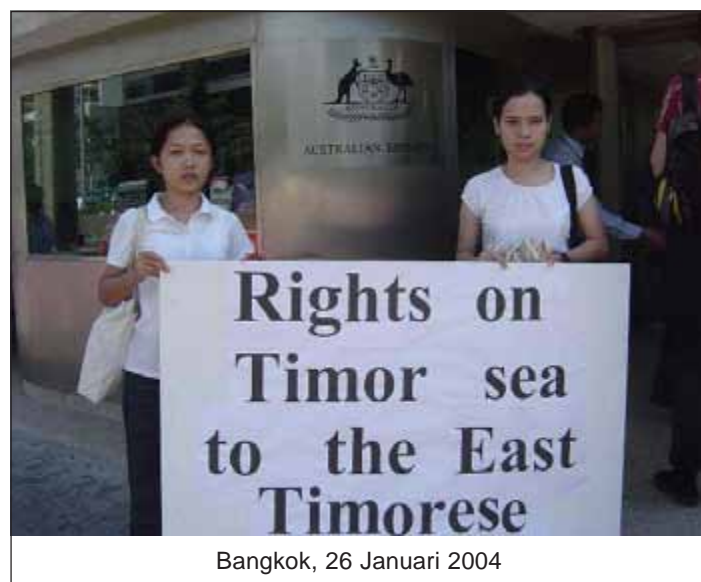
17 Juli 2003: Komite Operasi Luar Negeri Senat Amerika Serikat mendesak Timor-Leste dan Australia “agar terlibat dalam perundingan dengan niat baik untuk menyelesaikan perbatasan laut mereka secara cepat dan efisien sesuai dengan asas-asas hukum internasional.” Para anggota Kongres Amerika Serikat melakukan tindakan yang serupa beberapa kali selama dua tahun selanjutnya, biasanya sebelum pelaksanaan perundingan antara Timor-Leste dan Australia.

7 November 2003: Wakil-wakil lebih dari 100 organisasi non-pemerintah dari seluruh dunia menulis surat kepada Perdana Menteri Australia John Howard mendesaknya berunding secara adil dengan Timor-Leste mengenai perbatasan laut.

12 November 2003: Para perunding dari Timor-Leste dan Australia bertemu di Darwin untuk “sidang penjajakan” pertama mengenai perundingan perbatasan laut. Pemerintah Timor-Leste mengungkapkan ketidaksukaannya setelah perundingan ini.

2004

26 Januari 2004: Aksi sedunia pada hari nasional Australia memprotes pencurian mereka atas sumber alam Timor-Leste.



29 Maret 2004: Australia mengesahkan IUA Sunrise. Sampai hari ini, Parlemen Timor-Leste belum mengesahkan IUA, karena menganggapnya bertentangan dengan kepentingan nasional mereka.

April 2004: Kampanye-kampanye baru memprotes pencurian sumber alam Timor-Leste oleh Australia diluncurkan di dua negara Laut Timor: Timor Sea Justice Campaign (Kampanye Keadilan Laut Timor) di Australia, dan Movimento Kontra Okupasi Tasi Timor (Gerakan Menentang Pendudukan Laut Timor) di Timor-Leste. Protes-protes besar diselenggarakan di Dili.

19-22 April 2004: Putaran substantif pertama perundingan perbatasan dilangsungkan di Dili, dengan hasil sedikit.



Dili, di luar negosiasi di Hotel Timor, 21 April 2004

20 Mei 2004: Timor Sea Justice Campaign menyelenggarakan demonstrasi-demonstrasi di seluruh Australia, bagian dari kampanye yang meningkat yang mencakup iklan televisi, media, dukungan, protes, dan organisasi-organisasi keagamaan.



Washington, Juni 2004

11 Agustus 2004: Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta dan Menteri Luar Negeri Alexander Downer bertemu di Canberra, mengusulkan suatu “penyelesaian kreatif” untuk sengketa perbatasan, dimana Australia akan memberikan bagian yang lebih besar pendapatan dari wilayah yang disengketakan kepada Timor-Leste, sementara Timor-Leste akan setuju untuk mengesampingkan perbatasan laut tetap sekurang-kurangnya sampai semua minyak dan gas habis.

19-22 September 2004: Putaran kedua pembicaraan perbatasan diselenggarakan di Canberra, diikuti oleh perundingan di Darwin pada minggu selanjutnya. Pembicaraan-pembicaraan dihentikan tanpa kesepakatan atau pengumuman.

27 Oktober 2004: Perundingan mengenai perbatasan dilakukan lagi di Dili, dengan satu seruan untuk keadilan disampaikan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah Timor-Leste. Perundingan berakhir tanpa kesepakatan, memulihkan *status quo* sebelum “penyelesaian kreatif” 11 Agustus.

17 November 2004: Woodside menunda proyek Greater Sunrise karena kegagalan kesepakatan mengenai perbatasan.

2005

14 Januari 2005: Australia mengundang Timor-Leste untuk memulai kembali pembicaraan mengenai perbatasan. Timor-Leste menerima tawaran pada awal bulan Februari, dan perundingan dijadwalkan dilaksanakan Maret di Canberra.

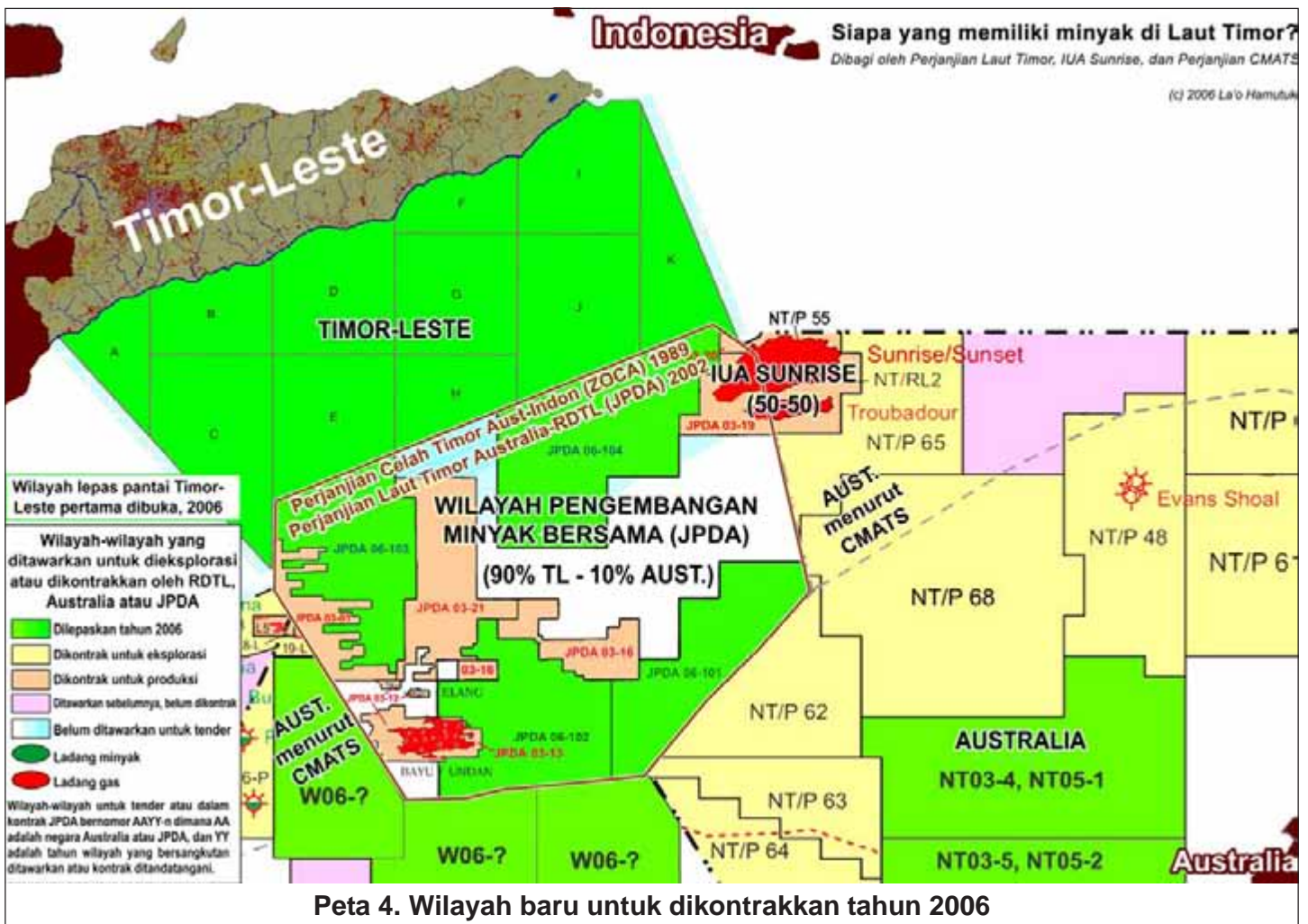
26 Januari 2005: Pada hari Australia, pengusaha Ian Melrose menyelenggarakan iklan televisi dan surat kabar menantang sikap Australia mengenai perundingan perbatasan dengan Timor-Leste. Satu rangkaian iklan yang menampilkan veteran Australia yang bertempur dalam Perang Dunia II sangat efektif.

7-9 Maret 2005: Para perunding Australia dan RDTL bertemu di Canberra. Bulan berikutnya mereka bertemu di Dili, sementara demonstrasi-demonstrasi diselenggarakan di seluruh Australia. Pertemuan ketiga diselenggarakan 11-13 Mei di Sydney. Australia mengklaim telah dibuatnya satu kesepakatan, tetapi para pejabat Timor-Leste tidak begitu jelas.



Sydney, April 2005

Juni 2005: Badan bantuan pemerintah Australia AusAID membatalkan satu pemberian hibah kepada satu organisasi hak asasi manusia Timor-Leste karena mereka bersuara terbuka menentang kelanjutan pendudukan Australia terhadap Laut Timor. (Lihat



Editorial, *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 6 No. 4, November 2005.) Dalam bulan November, AusAID membatalkan satu hibah lain untuk satu organisasi lingkungan non-pemerintah Timor-Leste.

September 2005: Timor-Leste dan Australia menyepakati rincian Ketentuan Penambangan Petroleum untuk JPDA, yang harus secara resmi disahkan sebelum putaran perizinan untuk wilayah JPDA baru yang dijadwalkan pada awal 2006 bisa dilaksanakan.

29 November 2005: Delegasi teknis Australia dan RDTL yang bertemu di Darwin mencapai satu kesepakatan untuk menyelesaikan ladang-ladang minyak dan gas yang disengketakan, tetapi tidak dikemukakan kepada umum.

2006

12 Januari 2006: Australia dan RDTL menandatangani Perjanjian Mengenai Ketentuan Laut Tertentu di Laut Timor (CMATS – Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea) di Sydney.

28 Februari 2006: Australia mengesahkan Ketentuan Penambangan Petroleum JPDA, yang memungkinkan putaran penawaran TSDA bisa dilangsungkan. (Lihat peta 4.)

Langkah-langkah selanjutnya:

- ✓ Ratifikasi CMATS oleh kedua negara.
- ✓ Putaran penawaran pertama untuk kawasan-kawasan di dalam wilayah laut Timor-Leste yang tidak disengketakan,

dilaksanakan oleh pemerintah RDTL berdasarkan Undang-undang Perminyakan Timor-Leste. Penawaran akan berakhir pada 19 April, dengan kontrak-kontrak ditandatangani pada 20 Juni.

- ✓ Putaran penawaran pertama untuk kawasan-kawasan baru di dalam JPDA berdasarkan Perjanjian Laut Timor, dilaksanakan oleh TSDA berdasarkan Ketentuan Penambangan Petroleum. Penawaran akan berakhir 26 Mei.
- ✓ Woodside Petroleum dan mitranya di Sunrise mencari pelanggan baru dan memutuskan rencana pengembangan, yang di dalamnya gas akan dicairkan. Rencana ini harus disahkan oleh Australia dan TSDA dalam waktu enam tahun setelah berlakunya CMATS, dan produksi harus dimulai dalam waktu 10 tahun, atau salah satu negara bisa meminta CMATS untuk diakhiri. Jika produksi Sunrise dimulai kemudian, Perjanjian CMATS otomatis diberlakukan kembali.

Isi Perjanjian CMATS

Perjanjian CMATS berisi dua belas pasal, dua lampiran, dan dua surat penjelasan. Perjanjian ini memasukkan dan mengubah isi Perjanjian Laut Timor 2002 dan Kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA) Sunrise yang ditandatangani pada tahun 2003 tetapi belum diratifikasi. Berikut ini adalah sebagian dari isi paling penting perjanjian ini, yang tersedia pada website www.laohamutuk.org.

Tanpa perbatasan laut: Pasal 2 CMATS mengatakan bahwa perjanjian ini tidak mengubah posisi kedua negara

Bisakah satu perjanjian diubah atau diakhiri?

Perjanjian CMATS, Perjanjian Laut Timor, Perjanjian Penyatuan Sunrise adalah perjanjian bilateral – kontrak yang ditandatangani antara dua pemerintah. Kekuatannya lebih besar dibandingkan hukum nasional. Sebagian perjanjian, khususnya konvensi-konvensi yang ditandatangani oleh banyak negara berisi ketentuan-ketentuan yang memungkinkan satu negara menarik diri dari sebagian atau seluruh bagian perjanjian yang bersangkutan. Perjanjian-perjanjian menyangkut minyak dan gas antara Timor-Leste dan Australia tidak. Di masa mendatang, salah satu negara tidak bisa sendiri membatalkan partisipasinya, tanpa memandang pemimpin politik yang berkuasa. Tetapi, perjanjian ini dan banyak perjanjian lain tanpa proses khusus penarikan diri terkena ketentuan Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian, yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Timor-Leste dan Australia. Menurut Pasal 54 Konvensi Wina, satu perjanjian bisa dibatalkan bila kedua negara sepakat untuk membatalkannya. Kedua pemerintah juga dimungkinkan untuk mengubah satu perjanjian yang telah diratifikasi; ini bisa dilakukan dengan satu perjanjian yang baru. Misalnya, Perjanjian CMATS mengubah jangka waktu Perjanjian Laut Timor, meskipun perjanjian ini telah berlaku selama tiga tahun.

mengenai perbatasan laut atau klaim wilayah, mengesampingkan pembahasan mengenai klaim mereka yang bertentangan selama perjanjian ini berlaku. Perjanjian CMATS berkali-kali menyebutkan bahwa tidak satu pihak pun akan menuntut hak kedaulatan (pasal 4.1), membahas perbatasan laut (pasal 4.6 dan 4.7) atau terlibat dalam proses hukum yang berkaitan dengan perbatasan laut atau yurisdiksi teritorial (pasal 4.4 dan 4.5).

Jangka waktu: Pasal 12 membuat CMATS berlaku untuk 50 tahun sesudah ratifikasi dan pemberlakuannya, walaupun ini bisa lebih pendek jika produksi Sunrise tidak dimulai dalam waktu 10 tahun atau berakhir kurang dari 45 tahun setelah CMATS berlaku. Jika kedua negara sepakat, CMATS bisa diperpanjang. Menurut Pasal 3 CMATS, Perjanjian Laut Timor 2002 (yang akan berakhir pada 2033 atau lebih cepat, jika perbatasan laut telah ditetapkan) diperpanjang selama CMATS berlaku. (Lihat garis waktu, halaman 18).

Jangka waktu 50 tahun tampaknya didasarkan pada pertimbangan komersial, memberikan kepastian kepada perusahaan-perusahaan perminyakan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber minyak dan gas tanpa perubahan kepemilikan sampai minyak dan gas telah dihabiskan. Ini sejalan dengan jangka waktu Perjanjian Laut Timor dan Perjanjian Celah Timor sebelumnya, serta dengan jangka waktu proyek minyak dan gas.

Mengesahkan eksploitasi Australia pada wilayah yang disengketakan: Dengan cara yang membingungkan, perjanjian CMATS memasukkan penerimaan Timor-Leste terhadap kegiatan-kegiatan perminyakan Australia di kawasan-kawasan yang sebelumnya disengketakan di luar JPDA. Pasal 4.2 mengatakan bahwa hukum dalam negeri kedua negara mengatur kegiatan sumber alam di bawah

laut dan mengesahkan yang baru berlaku seperti pada 19 Mei 2002 – hari sebelum RDTL menjadi negara berdaulat. Surat penjelasan kedua Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Timor-Leste tidak memiliki undang-undang pada hari itu, sementara Australia punya undang-undang khusus, mencakup perjanjiannya dengan Indonesia pada tahun 1972 (lihat peta 2) dan undang-undang perminyakan tahun 1967 dan 1994. Akibatnya, Australia diperbolehkan melanjutkan eksploitasi minyak di kawasan-kawasan tersebut, sementara Timor-Leste meninggalkan tuntutan-nya. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak jelas secara tak perlu.

Distribusi pendapatan Sunrise: Pasal 5 CMATS mengatakan bahwa pihak-pihak akan berbagi pendapatan hulu dari Kawasan Unit Sunrise secara sama. Setiap negara akan mendapatkan pendapatan sesuai dengan undang-undang perpajakannya dan IUA 2003 (yang memberikan 18% Sunrise kepada Timor-Leste dan 82% kepada Australia), dan kemudian Australia akan membayar Timor-Leste sehingga setiap negara mendapatkan jumlah yang sama. Misalnya, jika Australia mendapatkan \$ 82 juta dan Timor-Leste \$ 18 juta dalam satu kuartal tertentu, Australia kemudian akan membayar Timor-Leste \$32 juta sehingga setiap negara akhirnya mendapatkan \$ 50 juta.

Pendapatan yang dibahas dalam Pasal 5 adalah dari “eksploitasi hulu” – yaitu, nilai minyak dan gas pada titik valuasi ketika keluar dari sumur, sebelum memasuki pipa atau kapal. Pasal 6 dan Lampiran memberikan rincian mengenai bagaimana pembagian pendapatan ini dilaksanakan, dan satu mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan antara kedua negara.

Hak menangkap ikan: Pasal 8.1(b), bersama dengan Lampiran II, membagi sumber alam kolom air (mencakup ikan) antara kedua negara sepanjang tepi selatan JPDA, membolehkan nelayan Timor-Leste untuk bekerja di dalam JPDA, dengan syarat bahwa kegiatan mereka tidak menghambat kegiatan-kegiatan perminyakan. Perjanjian ini tidak menyebutkan hak menangkap ikan di kawasan-kawasan lateral di sebelah timur dan barat JPDA yang sebelumnya disengketakan.

Pada tahun 1997, Australia menandatangani satu perjanjian yang memberikan Indonesia hak kolom air di kawasan-kawasan ini, tetapi ini belum pernah diratifikasi, yang menimbulkan ambiguitas yang sekarang ini. Timor-Leste dan Indonesia belum merundingkan hak kolom air di lepas pantai utara, timur, dan selatan Timor-Leste. Perundingan ini juga bisa menyelesaikan persoalan dengan Australia, jika Australia melanjutkan menerima perbatasan kolom air yang disepakatinya dengan Indonesia pada tahun 1997.

Komisi Kelautan: Pasal 19 CMATS menciptakan Komisi ini, dengan satu orang diangkat oleh setiap negara. Komisi ini mengadakan rapat sekali setiap tahun untuk meninjau status ketentuan perbatasan laut (tetapi tidak mengubahnya), dan berkonsultasi mengenai keamanan, lingkungan, pengelolaan sumber alam, dan masalah-masalah lain. Mandatnya mencakup sumber alam yang bisa diperbaharui (ikan) dan tidak bisa diperbaharui (minyak dan gas), serta promosi strategi-strategi pengelolaan yang berkelanjutan.

Komisi Kelautan tidak punya wewenang mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dari Greater Sunrise. Keputusan-keputusan mengenai ini diberikan kepada Komisi Sunrise yang dibentuk berdasarkan Pasal 9.2 Kesepakatan Penyatuan Internasional Sunrise. Komisi Sunrise, yang beranggotakan dua orang Australia dan satu orang Timor-Leste, mengkoordinasikan kerja “otoritas pengaturan” di IUA – yaitu, pemerintah Australia dan Otoritas Mengenai Laut Timor (TSDA). Jika ada ketidaksepakatan yang tidak bisa diselesaikan oleh otorita pengaturan atau Komisi Sunrise, masalahnya bisa diajukan ke arbitrasi berdasarkan Pasal 26.2 dan Lampiran IV IUA.

Penyelesaian sengketa CMATS: Berlawanan dengan IUA, perjanjian CMATS melarang arbitrasi atau keterlibatan yudisial kecuali dalam satu hal yang sempit. Ia menetapkan bahwa sengketa mengenai perjanjian CMATS diselesaikan dengan konsultasi atau perundingan, suatu proses yang hampir selalu menguntungkan pihak yang lebih kuat. Tetapi, sengketa mengenai pengumpulan dan pembagian pajak dari Greater Sunrise bisa diatasi oleh seorang penasehat – seorang penengah yang ditunjuk oleh kedua negara atau oleh satu badan internasional yang tidak memihak.

Kritik mengenai perjanjian CMATS

Segera setelah perjanjian ini diumumkan, para pendukung hak Timor-Leste mengkritik Australia atas tindakan curangnya yang berlanjut terhadap Timor-Leste. Timor Sea Justice Campaign (Australia) menyebut perjanjian ini “bab buruk lain pengkhianatan politik luar negeri Australia” dan menggambarkannya sebagai “suatu solusi ‘hentikan celah, larang bantuan’ yang akan memungkinkan pengembangan komersial ladang Sunrise tanpa pemerintah Australia mengakui hak kedaulatan Timor-Leste atas ladang ini dan ladang-ladang lain di sisi Timor-Leste dari garis tengah. Pemerintah Australia tidak hanya menolak merundingkan perbatasan laut tetap sampai satu waktu ketika semua minyak dan gas telah habis diambil, tetapi ia terus menguras secara sepihak ladang Laminaria-Corallina dan Buffalo.”

Di Amerika Serikat, East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) tetap memandang perjanjian ini sebagai kelanjutan dari pendudukan ilegal yang didukung dan dilakukan pemerintah Australia terhadap rakyat Timor-Leste sejak 1975. Tetapi, ETAN mengatakan bahwa perjanjian CMATS “mungkin adalah yang terbaik yang bisa dicapai saat ini, karena tekanan pada Timor-Leste dari Australia dan perusahaan-perusahaan minyak serta kesenjangan ekonomi, politik, ukuran, dan lain-lain yang besar dalam suatu proses perundingan yang sifatnya tidak setara.”

Pada awal Maret 2006, *La’o Hamutuk* menulis sepucuk surat kepada Parlemen RDTL. Kami mengatakan bahwa Pemerintah RDTL punya wewenang sah untuk berunding dan menandatangani Perjanjian CMATS, tetapi kami mempertanyakan apakah perjanjian ini harus ditandatangani dan diratifikasi sekarang ini, ketika tekanan masyarakat sipil sedang efektif menggerakkan Australia lebih dekat ke arah menghormati kedaulatan dan hak

Timor-Leste. Lebih lanjut, pendapatan Bayu-Undan, jika dikelola dengan baik, akan cukup untuk kebutuhan Timor-Leste untuk sedikitnya lima belas tahun, sehingga tidak ada kebutuhan untuk cepat mengembangkan Sunrise.

Selain mengangkat persoalan perbatasan laut dan pendudukan ilegal, surat *La’o Hamutuk* menyebutkan bahwa CMATS menguntungkan Australia dan perusahaan-perusahaan minyak lebih daripada Timor-Leste. Kami juga mengingatkan kearifan Parlemen dan Pemerintah dalam menolak meratifikasi IUA Sunrise, yang memaksa Australia kembali ke meja perundingan, dan mengarah pada Perjanjian CMATS yang lebih baik. Akan tetapi, kami percaya bahwa CMATS bisa lebih baik lagi, dan kami mendesak Parlemen untuk tidak meratifikasi CMATS dalam bentuknya yang sekarang, tetapi agar mengirimkannya kembali untuk dirundingkan lagi, dengan tujuan berikut ini:

- Proses perundingan perbatasan laut harus dimungkinkan berlanjut sementara CMATS berlaku, termasuk ketika proyek Greater Sunrise berlanjut. Selain perundingan-perundingan, pihak manapun harus punya hak untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pihak ketiga yang tidak memihak, mencakup pihak yang ditentukan oleh hukum internasional, khususnya Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS).
- Selama waktu ini, harus ada moratorium mengenai eksplorasi ladang-ladang baru di luar JPDA dan IUA, tetapi di sisi Timor-Leste dari garis tengah (lihat peta 3). Seperti yang kami katakan sebelumnya, pendapatan yang diperoleh dari ladang-ladang di kawasan-kawasan yang disengketakan harus disimpan sampai perbatasan laut disepakati.
- Penyelesaian sengketa di bawah CMATS harus mencakup arbitrase dan pengadilan, selain mekanisme-mekanisme pihak ketiga tidak memihak. Penyelesaian itu tidak boleh dilarang untuk masalah-masalah yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penentuan kelautan (Pasal 4.5 CMATS) atau harus dilakukan dengan perundingan-perundingan yang tak berimbang (Pasal 11). Proses-proses arbitrase telah digunakan dalam Perjanjian Laut Timor dan IUA Sunrise, dan untuk sengketa pajak berdasarkan CMATS. Akan lebih adil jika menggunakan proses-proses yang serupa untuk semua sengketa yang bisa muncul dalam perjanjian CMATS.
- Pasal 9.8 IUA harus diubah untuk memberikan perwakilan yang sama dari kedua negara pada Komisi Sunrise. Ini akan membantu menjamin bahwa keputusan mengenai dimana memproses Gas Sunrise menghormati hak Timor-Leste.
- Satu pasal baru harus ditambahkan yang menyebutkan bahwa kedua pihak akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan ladang Sunrise dengan satu jalur gas ke Timor-Leste dan satu kilang LNG di wilayah kita, untuk memaksimalkan keuntungan bagi rakyat Timor-Leste.

Kami sepakat dengan pemerintah Timor-Leste bahwa kedua negara harus meningkatkan hubungan mereka untuk masa depan. Tetapi kami tidak bisa menerima tindakan dan pendekatan pemerintah Australia. Rakyat Timor-Leste dan Australia telah lama memiliki hubungan yang baik. Sejak Perang Dunia II, rakyat kita telah memperlihatkan niat baik dan membantu tentara Australia yang bertempur melawan Jepang. Dan dalam perjuangan melawan pendudukan Indonesia, rakyat Australia memperlihatkan solidaritasnya. Sekarang ini, rakyat Australia sedang membantu rakyat Timor-Leste dalam perjuangannya untuk mengembangkan negeri kita.

Akan tetapi tindakan-tindakan pemerintah Australia di Laut Timor memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai demokrasi di Australia. Kebanyakan rakyat Australia tidak sepakat dengan sikap pemerintah mereka. Kampanye-kampanye mereka, yang didukung oleh warga negara dan pejabat-pejabat Timor-Leste dan di seluruh dunia, telah menggerakkan pemerintah mereka. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa kampanye yang berkelanjutan, bersama dengan tawar-menawar yang cerdas oleh Pemerintah Timor-Leste, tidak akan menggerakkan Canberra lebih jauh.

Pengertian Istilah

Arbitrasi: Satu cara menyelesaikan sengketa dimana satu pihak ketiga, atau majelis yang disepakati bersama, membuat keputusan. Dua pihak yang bersengketa lebih dahulu sepakat untuk menerima keputusan penengah. Jika pihak-pihak tidak bisa menyepakati siapa yang menjadi penengah, ia bisa diangkat oleh satu badan internasional yang tidak memihak.

CMATS: Perjanjian mengenai Ketentuan Kelautan Tertentu di Laut Timor, ditandatangani oleh Australia dan Timor-Leste pada tanggal 12 Januari 2006 untuk mengalokasikan penghasilan hulu dari kawasan laut yang sebelumnya disengketakan sementara mengesampingkan pembahasan mengenai perbatasan laut.

Eksplorasi: Proses mengambil minyak dan gas dari dalam tanah, memprosesnya, dan menjualnya. Juga disebut **produksi**.

Eksplorasi: Proses analisis geologis, pengujian seismis, dan pengujian sumur untuk menentukan, mengidentifikasi, dan memperkirakan ukuran cadangan minyak dan gas di bawah tanah atau di bawah laut.

Gas alam: Satu sumber daya petroleum yang ditemukan di bawah tanah dalam bentuk gas, terdiri terutama dari metana dan etana, dengan jumlah lebih kecil hidrokarbon yang lebih berat. Ini banyak didistribusikan sebagai gas melalui pipa (biasanya setelah ekstraksi hidrokarbon yang berat), tetapi bisa dicairkan menjadi LNG untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan dengan kapal, kereta api, atau melalui jalan raya. Kebanyakan petroleum Timor-Leste di bawah laut adalah gas alam.

Hilir: Pemurnian atau pencairan bagian dari proses perminyakan, mengubah minyak atau gas yang

diekstraksikan (hulu) menjadi satu bentuk atau produk yang bisa diangkut dan dijual kepada pengguna.

Hulu: bagian dari proses pengembangan sumber alam minyak dan gas yang melibatkan penemuan dan pengambilan bahan mentah minyak dan gas dari tanah dan memasukkan ke pipa atau kapal untuk pemrosesan hilir lebih lanjut. Ini didefinisikan dalam CMATS sebagai kegiatan dan fasilitas petroleum sebelum titik valuasi yang didefinisikan dalam IUA Sunrise.

Ketentuan Penambangan Petroleum (Petroleum Mining Code – PMC): satu undang-undang yang diadopsi oleh TSDA pada tahun 2005 untuk mengatur kegiatan-kegiatan petroleum di kawasan-kawasan baru JPDA. Ladang-ladang Bayu-Undan, Elang-Kakatua, dan Greater Sunrise, yang telah dikontrakkan, dicakup oleh ketentuan sementara yang sebelumnya. PMC akan berlaku untuk kawasan-kawasan yang akan ditawarkan mulai sekarang. Australia tidak memberikan pengesahan PMC untuk mendesak Timor-Leste menandatangani Perjanjian CMATS, tetapi mengesahkannya pada bulan Februari 2006.

Kesepakatan Penyatuan Internasional (International Unitization Agreement – IUA): Satu kesepakatan antara dua negara untuk mengembangkan ladang atau ladang-ladang minyak yang melintasi perbatasan sebagai satu kesatuan tunggal, menerapkan satu sistem hukum, perpajakan, standar lingkungan, peraturan keamanan, peraturan perburuhan, dan sebagainya pada ladang tersebut. Ketika satu ladang dikembangkan sebagai satu proyek, menjadi tidak praktis untuk menerapkan peraturan yang berbeda-beda pada sisi-sisi yang berbeda dari garis imajiner pertengahan laut. Timor-Leste dan Australia menandatangani satu IUA untuk Greater Sunrise pada bulan Maret 2003, tetapi Parlemen Timor-Leste belum meratifikasinya. Perjanjian CMATS mensyaratkan ratifikasi IUA Sunrise.

Kolom Air: Sumber daya alam yang terkandung pada permukaan dan di dalam air laut, meliputi ikan dan bahan-bahan tidak larut, tetapi tidak meliputi dasar laut di bawahnya. Pada tahun 1997, Australia dan Indonesia menandatangani satu perjanjian menarik perbatasan antara sumber daya alam kolom air mereka (ikan dan sebagainya) sepanjang garis tengah sesuai dengan prinsip yang lebih modern (UNCLOS), tetapi perjanjian itu tidak pernah diratifikasi karena kemerdekaan Timor-Leste. CMATS mendefinisikan hak Timor-Leste atas sumber daya alam kolom air di dalam JPDA, dan hak Australia di sebelah selatannya, tetapi membiarkan terbuka siapa yang punya hak kolom air di kawasan-kawasan lateral.

Komisi Kelautan: dibentuk oleh CMATS, dengan perwakilan yang sama dari Timor-Leste dan Australia. Komisi meninjau dan berkonsultasi mengenai masalah-masalah lingkungan, keamanan, pengelolaan sumber alam, dan status perbatasan laut, tetapi tidak punya wewenang untuk merundingkan atau menentukan perbatasan laut.

Komisi Sunrise: dibentuk oleh IUA, komisi ini akan punya dua anggota yang diangkat Australia dan satu yang diangkat Timor-Leste. Komisi ini akan mengkoordinasikan kerja pemerintah Australia dan Otoritas Mengenai Laut Timor (TSDA) mengenai eksplorasi dan eksploitasi petroleum di Kawasan Unit Sunrise. Kalau terjadi ketidaksepakatan yang tidak bisa diselesaikan oleh otoritas pengaturan atau Komisi Sunrise, masalahnya bisa dibawa ke arbitrase.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, tahun 1982, dan diadopsi oleh kebanyakan negara di dunia. Perjanjian ini berlaku pada tahun 1994. Perjanjian ini mendefinisikan hukum untuk banyak masalah yang berhubungan dengan laut, mencakup pembentukan Zona Ekonomi Eksklusif dan prosedur-prosedur untuk menetapkan perbatasan laut menurut prinsip garis tengah. Juga mencakup satu proses untuk penyelesaian sengketa, di pengadilan maupun melalui arbitrase, yang darinya Australia menarik diri pada bulan Maret 2002. Indonesia meratifikasi UNCLOS pada tahun 1986, Australia pada tahun 1994. Timor-Leste belum menandatangani atau meratifikasi UNCLOS.

LNG (liquefied natural gas – gas alam yang dicairkan): Untuk pengangkutan gas alam dengan kapal, gas itu harus didinginkan dan ditekan dari keadaan gas alamiahnya menjadi satu cairan, sehingga tempat yang diperlukan lebih sedikit. Lihat Pencairan (liquefaction).

Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of Justice – ICJ): Satu pengadilan di kota Den Haag, Negeri Belanda, dimana pemerintah-pemerintah nasional bisa mengajukan gugatan kasus-kasus perdata terhadap negara lain. ICJ sering menjadi penengah atau arbitrator dalam sengketa perbatasan laut. Pada bulan Maret 2002, Australia mengeluarkan pemberitahuan bahwa tidak akan menerima proses ICJ atau UNCLOS lagi untuk mengarbitrase perbatasan laut.

Operator: Satu perusahaan minyak yang merupakan bagian dari satu usaha gabungan (kebanyakan pemegang saham terbesarnya) dan memegang tanggungjawab untuk eksplorasi, pengeboran, konstruksi, dan operasi fasilitas-fasilitas pemrosesan. Akan tetapi, semua mitra usaha gabungan biasanya membuat keputusan besar secara bersama, masing-masing memiliki satu suara yang sesuai dengan besarnya saham mereka. ConocoPhillips dan Woodside Petroleum masing-masing adalah operator Bayu-Undan dan Greater Sunrise.

Pencairan (liquefaction): Proses mengubah gas alam menjadi cair (LNG) untuk dimuat kapal, dilakukan di kilang besar dan memerlukan pendinginan dan tekanan. Gas alam Bayu-Undan dicairkan di fasilitas Wickham Point di Darwin. Belum ada keputusan yang dibuat mengenai di mana gas dari Greater Sunrise akan diproses.

Pengaturan Laut Timor (Timor Sea Arrangement): suatu kesepakatan yang dibuat Juli 2001 antara UN-TAET dan Australia yang menetapkan ketentuan-ketentuan dasar Perjanjian Laut Timor yang ditandatangani tahun berikutnya: melanjutkan kegiatan-kegiatan petroleum di ZOC/JPDA, dengan pendapatan hulu dibagi 90% untuk Timor-Leste dan 10% untuk Australia, dan menghindari sengketa perbatasan laut.

Perbatasan Lateral: Definisi mengenai wilayah mana yang milik Timor-Leste dan mana Australia di kawasan sebelah timur dan barat JPDA. Ini belum ditetapkan, tetapi akan lebih luas daripada batas JPDA menurut asas-asas hukum internasional sekarang. Tepian JPDA ditetapkan oleh Indonesia dan Australia pada tahun 1972 dan 1989, tanpa partisipasi dari Portugal atau Timor-Leste. Menurut CMATS, Timor-Leste memberi Australia hak untuk mengambil minyak dari kawasan-kawasan yang sebelumnya disengketakan.

Perjanjian Celah Timor: ditandatangani Australia dan Indonesia pada tahun 1989 untuk memungkinkan kedua negara mengeksplorasi minyak dan gas di wilayah dasar laut Timor-Leste yang waktu itu diduduki secara ilegal, dengan jangka waktu 40 tahun. Perjanjian ini menutup Celah Timor dalam garis perbatasan dasar laut Australia-Indonesia tahun 1972 dengan menetapkan satu Zona Kerjasama (Zone of Cooperation), yang kemudian disebut Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (Joint Petroleum Development Area – JPDA). Perjanjian Celah Timor menjadi tidak ada artinya pada bulan Oktober 1999, ketika Indonesia melepaskan klaimnya atas Timor-Leste.

Perjanjian Laut Timor: Ditandatangani antara Timor-Leste dan Australia pada tanggal 20 Mei 2002, berlaku mulai 2 April 2003. Ini melanjutkan JPDA yang ditetapkan dalam Perjanjian Celah Timor, tetapi menggantikan Indonesia dengan Timor-Leste dan mengalokasikan 90% pendapatan pemerintah JPDA untuk Timor-Leste. Perjanjian Laut Timor menjadi tidak berlaku setelah 30 tahun, atau setelah perbatasan laut tetap disepakati antara kedua negara, tergantung mana yang lebih dulu.

Perjanjian perbatasan dasar laut: ditandatangani Australia dan Indonesia pada tahun 1972. Perjanjian ini menarik perbatasan pemilikan hak antara dasar laut kedua negara, mengikuti prinsip landas kontinental yang menarik garis melalui Palung Timor, perairan terdalam antara kedua negara. Portugal, yang saat itu adalah penguasa administratif Timor-Leste, menolak ambil bagian dalam perundingan, sehingga tercipta satu celah di garis lepas pantai Timor-Leste.

Petroleum (minyak dan gas): bahan bakar cair, gas, dan fosil padat yang ditemukan di bawah tanah; semuanya secara alamiah terbentuk dari hidrokarbon. Petroleum mencakup minyak mentah, kondensat, gas petroleum yang dicairkan (LPG), dan gas alam.

Prinsip garis tengah: Ketentuan hukum yang diterima untuk menyelesaikan suatu perbatasan laut ketika Zona Ekonomi Eksklusif dua negara tumpang tindih. Seperti ditetapkan oleh UNCLOS dan banyak keputusan Mahkamah Pengadilan Internasional, perbatasan harus dibuat di garis tengah antara garis pantai kedua negara.

Timor Sea Designated Authority (TSDA – Otoritas Mengenai Laut Timor): Badan pengaturan untuk JPDA, dibentuk oleh Perjanjian Laut Timor, 2/3 dikontrol oleh Timor-Leste. TSDA bertindak seolah-olah adalah pemerintah untuk keperluan pengontrakan dan pengelolaan operasi perusahaan minyak di JPDA.

Titik valuasi (valuation point): titik penjualan komersial pertama minyak dan gas yang diambil dari ladang Sunrise, yaitu ketika gas alam memasuki pipa yang meninggalkan Wilayah Unit. Untuk unsur-unsur yang bisa dipasarkan lainnya – seperti minyak mentah, kondensat, gas petroleum yang dicairkan (LPG, propana), ia merupakan penjualan pertama unsur ini. (Lihat Pasal 1(h), 1(i) dan 1(t) IUA).

Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (Joint Petroleum Development Area – JPDA): Satu wilayah Laut Timor antara Timor-Leste dan Australia, tetapi lebih dekat ke Timor-Leste. Ini pertama kali didefinisikan dalam Perjanjian Celah Timor 1989 sebagai Zona wilayah Kerjasama A, dan ditetapkan kembali dalam Perjanjian Laut Timor. Sekarang wilayah ini dikem-

bangkan bersama oleh Timor-Leste dan Australia, dengan Timor-Leste memperoleh 90% dari penghasilan pemerintah dari produksi hulu. JPDA mencakup ladang minyak dan gas Bayu-Undan dan Elang-Kakatua serta sekitar 20% ladang Greater Sunrise.

Wilayah Disatukan, Wilayah Penyatuan, Wilayah Unit: Lihat Kesepakatan Penyatuan Internasional.

Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE): satu kawasan laut dan dasar laut sekitar wilayah daratan suatu negara dimana negara yang bersangkutan memiliki hak untuk mengeksploitasi dan menjual sumber alam di dalam dan di bawah air. Berdasarkan UNCLOS, ZEE melebar 200 mil laut (330 km) dari pantai. Ketika dua negara jaraknya kurang dari 400 mil laut, satu proses perundingan dan/atau arbitrase bisa memutuskan perbatasan antara ZEE keduanya, yang biasanya membagi sepanjang garis tengah.

Zona Kerjasama (Zone of Cooperation): Satu bagian dari laut Timor antara Australia dan Timor-Leste, tetapi lebih dekat ke Timor-Leste. Ini diciptakan oleh Australia dan Indonesia dalam Perjanjian Celah Timor tahun 1989 sebagai satu mekanisme untuk pembagian hasil pendapatan petroleum ketika mereka tidak bisa mencapai kesepakatan mengenai perbatasan laut. Bagian tengahnya – Wilayah A – menjadi Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) di bawah Perjanjian Laut Timor. Lihat peta 1. ❖

NGO Memilih Utusannya untuk Dewan Penasehat Dana Perminyakan

Dewan Penasehat Dana Perminyakan telah didirikan. Menurut Undang-undang Dana Perminyakan pasal 25.2, peranan dari Dewan Penasehat adalah untuk memberikan nasehat kepada Parlemen mengenai kinerja dan operasi Dana Minyak dan pengambilan dana, untuk dilihat apakah dana tersebut digunakan secara efektif untuk manfaat generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dewan Penasehat ini akan terdiri dari dua anggota yang dipilih oleh Parlemen, dua utusan dari NGO, seorang utusan dari organisasi keagamaan dan seorang utusan dari sektor bisnis swasta, untuk jangka waktu lima tahun. Di masa mendatang, Dewan ini juga akan beranggotakan mantan Presiden Republik, mantan Ketua Parlemen, mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Keuangan, dan mantan Direktur Bank Sentral (BPA). Karena orang-orang seperti itu belum ada di Timor-Leste, maka Presiden

Republik, Ketua Parlemen, dan Perdana Menteri akan mengangkat orang-orang pengganti untuk tiga posisi tersebut.

Pada 24 Februari, NGO Forum (FONGTIL) memfasilitasi pemilihan untuk memilih dua utusan NGO sebagai Dewan Penasehat. Calon yang diajukan adalah Cecilio Caminha Freitas (ETPA), Thomas Sebastião Freitas (Luta Hamutuk), Henriqueta Maria da Silva (TIDS) dan Maria Dias (Klinik PAS, mewakili Rede Feto), kemudian yang terpilih adalah Maria Dias dan Thomas Freitas. Dengan partisipasi utusan NGO di Dewan Penasehat ini, NGO memiliki saluran untuk memberi masukan kepada Parlemen. Para utusan ini juga diharapkan untuk membantu informasi dan komunikasi dua arah antara masyarakat sipil dan para pejabat di Parlemen dan Pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber dana. ❖

Haburas Ita Nia Rekursu Ba Timor-oan Sira Hotu Nia Diak

Hosi Primeiro Ministro Mari Alkatiri

Governo Timor-Leste haka'as-an tebe-tebes hodi haburas rejime ida ne'ebé diak liu ba dezvoltamentu rekursu minarai nian no jestaun kona-ba reseita hirak ne'ebé iha relasaun ho jestaun ne'e iha mundo rai klaran. Hanesan moe boot ida wainhira La' o Hamutuk la halo buat hanesan ne'e wainhira hakerek no halo peskiza ba nia komentáriu iha surat tahan sia ne'ebé fó sai tiha ona iha fulan Novembru iha *Buletin La' o Hamutuk* nian.

Ha'u sente perturbadu uit-oan atu hateten katak, pelo menos La' o Hamutuk fo-sai buat ida hanesan fali analize definitivu ida kona-ba ita nia rejime minarai nian hodi la hato'o netik nem ba ema ida iha ha'u nia Governu, no la husu mos ba ema ida iha ha'u nia Governu atu fo komentáriu kona-ba ezbosu ida hosi artigu ne'e.

Ida ne'e hatudu erru boot ida tuir padraun profesionalismu nian, no ha'u hein lolós katak ONG seluk, iha Timor-Leste, labele tuir ezemplu ida ne'e. Tuir lolós molok atu fó-sai publiksaun, tuir padraun iha prátika jurnalismu nian, sei husu uluk lai komentáriu hosi ema no organizaun hirak ne'ebé relevante, no ida ne'e liu-liu hanesan kazu ida wainhira hakarak publika artigu ida ho detalhes hodi haklaken lia oin-oin kona-ba observasaun no afirmasaun. Ema fo konsellu ba ha'u atu haruka artigu ne'e ba instituisaun multilateral ida atu husu nia komentáriu, ne'ebé ha'u hakarak informa katak, La' o Hamutuk la iha responsabilidade institusional ba rejime ida ne'e.

Artigu ne'e hateten katak, tuir Artigu 139 hosi Konstituisaun Timor-Leste nian katak, rekursu hirak ne'e pertense ba Estado, maibé "la'os ba Governu especial ida iha tempu especial ida nia laran". Ida ne'e lalós. Governo RDTL maka nu'udar administrasaun ida ne'ebé hili tuir Konstituisaun no iha direitu no responsabilidade atu dezvoltolve rekursu hirak nasaun ne'e nian hodi halo sai potensial. La' o Hamutuk hanesan fali iha problema ho Governu ida ne'ebé hakarak hala'o nafatin ekonomia iha rai ne'e. Tuir Konstituisaun, governu eleitu mak iha direitu atu dezvoltolve rekursu minarai nian ne'ebé maka pertense ba Estado. Rekursu hirak ne'e fó ba Timor-Leste oportunidade ida ke dia'k liu atu asegura independénsia ekonómika no prosperidade ba tempu naruk nia laran. Karik la iha ida ne'e, maka povu Timor-Leste sei sai totalmente dependente ba iha donativu no emprestimu hirak, hosi rai liur nian, atu hala'o dezvoltomentu ba nasaun ida ne'e.

Iha editorial kona-ba "dependénsia minarai" nian, La' o hamutuk fó sai ho maneira ida negativu tebes kona-ba planu reseita minarai nian ne'ebé atu tama mai rai laran, no ida ne'e hanesan fali foin ba dala uluk ita-boot koalía ba povu Timor-Leste kona-ba ida ne'e. Ha'u nakloke ba ema hotu nia hanoin kona-ba perigu dependénsia ba minarai nian no haksasuk buat barak ho sira kona-ba ida ne'e. De faktu ha'u nia Governu

tama-sai fatin-fatin iha paiz ne'e nia laran, nu'udar parte ida hosi ninia konsulta publiku, hodi koalía ba ema sira kona-ba perigu hirak ne'e. Konsiénsia ida ne'e maka'as tebes iha primeiru planu hosi ami nia hanoin kona-ba atu dezvoltolve Fundu Minarai nian.

No karik la iha reseita hirak ne'e maka alternativa seluk saida? Iha komentáriu tahan hat La' o Hamutuk nian kona-ba dependénsia-minarai nian, ita-boot la fó-sai nem alternativa ida. Resposta maka ida ne'e, katak la iha tan alternativa seluk sela'e atu depende deit ba iha tulun. Nune'e, maka tansá ami koalía liu kona-ba oinsá maka bele dezvoltolve modelu jestaun ida ne'ebé ho kuidadu tebe-tebes, iha transparénsia no ba tempu-naruk nian ba ita nia reseita minarai nian, .

Ida ne'e maka la mosu iha komentáriu La' o Hamutuk nian. Oras ne'e la iha nem esplikaun ida kona-ba oinsá Timor-Leste harí sistema ida hodi halo jestaun ba ninia reseita minarai nian sira, atu nune'e ita bele dezvoltolve no bele sés-an hosi praga hosi rekursu ne'e. Ita-boot la esplika to'ok kona-ba Fundu Minarai nian atu hala'o oinsá, ne'ebé halo ha'u hanoin katak artigu ida ne'e sai liu fali hanesan informasaun sala ida em vez de atu sai nu'udar kontribuisaun ida hodi habúras ita nia rain.

Ita-boot koalía iha artigu ida ne'e katak, durante konsulta, iha distritu sira, povu simu "informasaun uitoan deit". Halo favor ita-boot hola nota katak, hanesan hatama tan ba iha apresentasaun pormenorizada ne'ebé ami hato'o kona-ba Fundu Minarai nian, iha durante faze konsulta nian, ha'u oras ne'e iha ekipa ida maka tama-sai hela sentru hirak iha sub-distritu iha Timor-Leste nia laran, atu esplika, ho detalhes, kona-ba fundu minarai nian. To'o oras ne'e sira ekipa ne'e tama-sai tiha ona sub-distritu liu 55, ho ema sira ne'ebé mai tuir iha sesaun informativa, ne'ebé dala barak han oras 3 ka liu, hamutuk ho média ema liu na'in 50.

Ha'u hakarak hateten deit ba ita-boot kona-ba informasaun saida maka ba povu sira iha distritu no sub-distritu bele hetan, wainhira La' o Hamutuk la hanoin hetan katak ida ne'e importante ba ninia leitor sira.

Fundu minarai nian iha karakteristiká hirak prinsipal kona-ba planu atu tulun Timor-Leste hodi sés-an hosi praga hanesan tuir mai ne'e:

- ✓ Osan hosi Fundu ne'e liu porsentu 90 sei investe iha obrigasaun risku-ki'ik Governu Estados Unidos nian. Ida ne'e atu evita problema hirak ne'ebé nasaun riku minarai nian esperimenta tiha ona kona-ba inflasaun ekonomia doméstika no halo sira labele hetan kompetisaun hodi hadia hikas fali sira nia maioria ka reseita tomak.
- ✓ reseita minarai nian tomak sei selu direktamente ba iha Fundu liu hosi konta bankária rezerva ne'ebé Autoridade Bancária no Pagamento maka sei hola konta hamutuk Konsellu Federal Administrativu de Rezerva Estados Unidos nian iha Nova Yorke.

Númeru konta nian maka 021080973. Ida ne'e hanesan karakterístika adisional ida liu fali ida ne'ebé Noruega hari.

- ✓ Atu foti osan hosi fundu ne'e Parlamento Nacional tenke aprova no sira tenke lori deklarasaun ida hosi auditor independente ida kona-ba Kálkulu Reseita Sustentável hosi rikuso minarai Timor-Leste nian. Prosesu ida ne'e mos sei hetan supervizaun hosi Konsellu Konsultivu ida ne'ebé maka forma hosi ema hirak koñesidu, ne'ebé dala ida tan, sai hanesan medida transparénsia adisional ida wainhira kompara ho modelu Noruega nian.

Ha'u haré katak ita-boot hateten iha artigu segundu kona-ba rejime katak *Lei Fundu Minarai* nian la tama iha analize La'o Hamutuk nian. Ida ne'e hanesan koalia arbiru deit no lalós. Ida ne'e hakarak hateten katak Lei ne'ebé maka sai nu'udar parte integrante hosi ami nia rejime, la tama iha neba. Governu sempre hatama lei ne'e wainhira ami haksasuk kona-ba ami nia rejime basá Lei ne'e iha tebe-tebes transparénsia no responsabilizasaun. Atu oinsá mos, medida hirak ne'e, ba La'o Hamutuk nia avaliasaun ba ami nia rejime la importante. Hodi hasai deit Lei ne'e maka ita-boot hakarak halo afirmasaun mamuk ida hanesan "rejime minarai Timor-Leste nian iha deit sala maka'as, omisaun, konfliktu kona-ba interese no problema fundamental seluk tan".

Iha seksaun kona-ba transparénsia, ita-boot halo konkluzsaun sala, wainhira hateten katak ami troka fali mekanizmu Rejistu Publiku. De faktu ami mantéin nafatin ho padraun ida uluk nian kona-ba atu fo-sai informasaun, ne'ebé hakerek iha versaun final lei nian, maka kona-ba atu fo "Autorizasaun no Emenda ba ida ne'e".

Kontráriu ho La'o Hamutuk nia afirmasaun katak "la fo-sai ba publiku" wainhira iha mudansa ruma kona-ba autorizasaun. Artigu 30 (a) (ii) ejiji "detalles kona-ba izensaun hosi, ka mudansa ka suspensaun ba, kondisaun hirak atu fo Autorizasaun tuir hakerek iha Artigu 21". Buat ida tan, tuir lei ami tenki fo-sai sumáriu hirak kona-ba planu dezenvolvimentu nian. Naran avaliasaun ida kona-ba ami nia rejime, sei fó-sai ba públiku buat ida ne'ebé diak liu fali prátika iha mundu internasional. La'o Hamutuk simu tiha ona, iha tempu liu ba, kópia hirak kona-ba Kontratu Partilla Produsaun, ne'ebé maka ema hotu bele hetan iha ami nia portal (website) www.transparency.gov.tl. Seksaun kona-ba transparénsia la fó-sai portal ida ne'e, ne'ebé ha'u promete tiha ona wainhira ha'u halo diskursu ih sorumutuk kona-ba Inisiativa Transparénsia nian ba Industria Ekstrativa, iha Londres, dadauk iha tinan ida ne'e nia laran. Ida ne'e hanesan omisaun sériu seluk ne'ebé obriga ha'u atu tau kestaun ba La'o Hamutuk nia motivu sira.

Buat ida tan katak, La'o Hamutuk halo firmasaun sala wainhira dehan katak, ezbosu lei nian permite ona proprietáriu privadu rai nian atu la simu facilidade hirak kona-ba minarai nian iha sira nia rain. Ezbosu ne'e la koalia kona-ba ida ne'e. Wainhira koalia oin seluk maka ida ne'e kontradiz ho 139 Konstituisaun nian tanba rekursu pertense ba Estadu. Maibé ezbosu no lei rasik hateten momós hela katak proprietáriu sira iha direitu atu simu "kompensasaun ne'ebé justu no

razoável" hosi ema sira ne'ebé halo dezenvolvimentu.

Kontráriu ho La'o Hamutuk nia afirmasaun kona-ba proteksaun ba ambiente katak, Lei Minarai nian ejiji proteksaun ba ambiente, no detalles kona-ba ida ne'e, inklui Avaliasaun ba Impaktu Ambiental ne'ebé bele hetan fatin iha regulamentu sira nia laran. Hakarak hola nota mos katak projektu asisténsia teknika Noruega nian hala'o tiha ona kolókiu EIA ida ba repartisaun sivil sira, hodi prepara Timor-Leste atu bele hetan kbiit wainhira halo jestaun ba parte ida ne'e kona-ba prosesu dezenvolvimentu nian.

Komentáriu kona-ba envolvimentu comunidade lokal ne'e halo deit ha'u atu hasai konkluzsaun ida katak La'o Hamutuk nunka iha kontaktu ida ho povu Timor-Leste. Ida ne'e maka baze fundamental ba analize La'o Hamutuk nian. Ita-boot lakohi atu dezenvolvimentu ne'e mosu, ka karik bele mosu maibé, iha wainhira remata ona kolokiu hirak ne'ebé envolve konsultante internasional no ONG sira ne'ebé maka hetan fundu hosi rai liur nian, hanesan La'o Hamutuk.

Wainhira ha'u nia konselleiru sira hit-an ba iha distritu sira atu hato'o informasaun sira dala barak fo relatóriu mai ha'u kona-ba komentáriu hirak sira hetan hosi xefe aldeia no representante comunidade nian sira seluk kona-ba tansá maka Governu la dada kadalak no refinaria mai iha Timor-Leste. Sira hatene katak rekursu Tasi Timor nian besik liu mai ita nia rain, kuaze distánsia baluk deit ba rai Australia. Povu Timor-Leste oras ne'e hakarak atu haré sira nia rekursu bele sai buras, no sira hakarak atu rekursu hirak ne'e sai kedas buras. Sira la tauk atu haré dezenvolvimentu ne'e mosu iha sira nia hela fatin – no tuir lolós sira sei simu ho liman rua.

Liu tina tolu ho balu ona sura hosi loron restaurasaun ukun-rasik-an nian no wainhira ami hala'o buat barak – liu-liu rejime foun kona-ba minarai nian – ema barak maka hetok la iha pasiénsia. Sira hakarak atu haré buat hirak ne'e mosu lalais deit. Ida ne'e maka kazu kona-ba Lei Minarai nian fo autoridade balu ba Ministru, maibé buat hotu ne'ebé hateten ne'e tenki sai nakloke ba ema hotu tuir hakerek iha lei

Nu'udar nasaun foun ida, ho rejime foun minarai nian, ita presiza iha fleksibilidade. Ita moris iha mundu ida kompetitivu no ita hetan fatin as liu kompara ho nasaun sira seluk. Ita seidauk hakerek buat barak kona-ba dezenvolvimentu minarai nian. Diak liu ita hanoin katak, nasaun barak ne'ebé maka sei hala'o hela dezenvolvimentu maibé hetan susesu iha mundu, maka nasaun hirak ne'ebé maka hetan Governu ida ho vizaun klaru wainhira sira hakarak ukun rai ne'e, no sira maka hirak ne'ebé bele sai desizivu no oras ne'e ukun hodi povu nia naran ne'ebé hili sira.

Povu Timor-Leste kleur tebes duni maka ema halo nia la la'o ba oin. Ukun-rasik-an la'os katak, la iha ona terus ka susar no ita sei iha media mortalidade ne'ebé sei ás ba ita nia labarik sira. Ita hetan buat ida ne'e tanba sira hotu ne'ebé maka terus, no sira ne'ebé entrega sira nia moris ba ita nia ukun-rasik-an, atu bele la'o ba oin no halo dezenvolvimentu ekonomia nian sai nu'udar realidade ida ba ema hotu iha rai ida ne'e. Ha'u iha orgullu tebe-tebes ho rejime minarai Timor-Leste nian basá rejime ne'e estabelese momós hela kona-ba enkuadramentu ida atu hetan objektivu ne'e. ❖

La'ó Hamutuk Resposta Ba Primeiru Ministru Nia Artigu

La'ó Hamutuk apresia resposta husi Primeiru Ministru ba artigu *La'ó Hamutuk* nian nebe publika iha *Boletin* fulan Novembru liu ba. Ami kontenti tamba S.E. Sr. Primeiru Ministru le'e duni saida mak ami koalia sai no ami fiar katak ami nian haree no S. E. Primeiru Ministru nian mos barak liu mak hanesan duke ida la'e nian. Ne'e duni ami simu oportunitadi ida ne'e hodi bele kontinua hala'ó dialogu nune'e bele klarifika konaba asuntu hirak ne'e.

Dalaruma mos ema konfronta ho informasaun nebe ladiak hodi ataka mensajeiru nebe hato'ó lia ne'e. Buat hirak hanesan ne'e ami senti iha artigu S.E. Primeiru Ministru nian no infelizmente husi Governu nia parti mos hakarak halo daudaun defamasaun sai nudar delitu kriminal. (Hare pagina 22.) Iha komentariu ida ne'e no iha ami nia artigu laran tomak, *La'ó Hamutuk* foka atensaun liu ba substansia – konaba saida mak hateten ona ka hala'ó tiha ona duke konaba ema nebe mak hateten ida ne'e. Ami mos enkorajem maluk sira iha Timor-Leste nia laran, nomos ba maluk hirak nebe mak iha Governu laran ka iha liur atu mos bele halo hanesan ne'e.

La'ó Hamutuk la kontra dezvoltimentu petrolifera iha Timor-Leste. Ami rekoñese katak fa'an mina ho gas hanesan dalam ida atu nune'e iha dekade hirak besik daudaun iha futuru mai, Timor-Leste bele liberta-an husi dependensia ba doadores, hodi nune'e bele fornese ba dezvoltimentu ekonomiku nebe nesesitadu teb-tebes, atu nune'e bele servi duni ba ita nia sidadaun tomak. Ami apresia Governu nia servisu iha area ida ne'e, tamba milaun \$500 ho resin mak depozita tiha ona iha Fundu Petrolifera nian. Ami konkorda katak Governu ida ne'e rasik iha poder legal no responsabilidade moral hodi halo leis ba dezvoltimentu mina no gas no halo manajementu ba rendimentu iha Timor-Leste nian, no iha ne'e mak ami mos koko oferese sujestaun hirak konstrutivu nian bainhira ami hanoin katak desizaun politika hirak Governu aplika ne'e karik ladun perfektu, no ami fo'ó hanoin ruma banhira ami haree katak karik iha aspetu balun husi industria nian nebe mak bele fo'ó perigu ba Timor-Leste.

Timor-Leste nia leis petrolifera nian no nia manajementu ba rendimentu diak liu duke nasaun terseiru mundu sira seluk. Tamban ne'e duni ami aplaude ba Governu nia servisu maka'as hodi halo buat hanesan ne'e. Importunamente, esperiensia husi kuaze nasaun terseiru mundu sira ho industria petrolifera internasional halo buat negativu deit. Hanesan *La'ó Hamutuk* hakerek submisaun ba Governu iha tinan 2004, no dala ida tan mos ami hakerek iha ami nia artigu *Boletin* fulan Novembru liuba, katak sidadaun Timor-Leste oan sira iha duni direitu atu hetan protesau maka'as ba direitus humanus, meio ambiente, no siguransa ekonomiku ba longu prazu. Maski Governu nia leis petrolifera nian fornese protesau balun iha area hirak ne'e, maibe bele sai forti liutan fali nasaun riku sira seluk nian. Maski lei nasaun riku sira nian dalabarak la-fornese protesau diak; pur izemplu, iha fulan Janeiro liu ba, *The New York Times*, halo publikasaun konaba koluzau entre kompañia gas ho regulador sira husi governu Estados Unidos Amerika nian nebe permiti

kompañia sira atu bele manobra governu nia osan tokon ba tokon dolar Amerika hosi royalti gas nian.

La'ó Hamutuk apoia maka'as teb-tebes ba Fundu Petrolifera no esforsu nebe mak Governu hala'ó tiha ona. Ami mos involve ho governu hahu kedas husi prosesu halo lejislasau, hato'ó sujestaun barak hodi hametin liutan objetivu Fundus ne'e nian atu nune'e bele salvaguarda jersaun hirak iha futuru nian husi ita nia rekursus petrolifera ne'e duni. Ami nia *Boletin* fulan Dezembru 2005 nian hatama mos artigu primeiru relatorio trimestral konaba Fundus petrolifera ne'e nian.

Ami nia *Boletin* Novembru 2005 nebe mak Primeiru Ministru halo resposta hasoru ne'e hanesan kuartu *Boletin* nebe mak ami foka ba jestaun hirak mina ho gas nian. Komesa iha tinan 2000, *La'ó Hamutuk* publika tiha ona artigu ruanulu resin konaba dezvoltimentu petrolifera iha Timor-Leste. Ami halo peskiza bo'ot no entrevista ba ema oficiais barak nebe mak responsavel ba dezvoltimentu mina ho gas iha Timor-Leste, atu hetan informasaun ba ami nia relatoriu, bele hetan iha Bahasa Indonesia ho Ingles iha ami nia eskritoriu iha Farol-Dili ka iha ami nia website. Ami laos reklama katak ne'e “analize definitivu,” maibe simplizmente atu oferese deit informasaun no perspetiva balun hodi kompleta deit buat hirak nebe mak governu no ema seluk hato'ó tiha ona.

Ami nia *Boletin* fulan Novembru 2005, hakerek konaba dependensia petrolifera no lei petrolifera, maibe ami sei hakerek nafatin konaba parti seluk husi asuntu tekniku kompleksu ida ne'e – fronteira maritima, impaktu sosial no ekonomiku, meio ambiente, transparensia, kompañia mina, manajementu ba rendimentu, no seluk tan. Sei imposivel wainhira hakarak koalia asuntu hirak ne'e hotu dala ida deit iha tempu hanesan. Artigu hirak iha fulan Novembru hakerek konaba “rejime” – Lei hirak nebe regula konaba projetu petrolifera, liuliu relasaun entre RDTL ho kompañia mina internasional nebe mak mai iha ne'e hodi halo osan husi ita nia rekursus. Lei Fundu Petrolifera mos importante, defini responsabilidade no prosedimentus entre Governu Timor-Leste ho kompañia petrolifera internasional sira nebe mak mai iha ne'e halo osan hosi ita nia rekursus. Ami nia diskusaun separada konaba rejime ho Fundu paralelu ho konsultasaun publiku separada nebe Governu hala'ó iha tinan 2004 ho 2005.

Ami konkorda ho Primeiru Ministru nebe hateten katak konsultasaun publiku, manajementu ba rendimentu nebe diak, transparensia, involvimentu komunidadadi nian no protesau ba meio ambiente ne'e importante hodi halo susesu ba dezvoltimentu petrolifera. Iha ne'e ami apresia esforsu husi governu nebe mak hala'ó dadaun iha area hirak ne'e. Maibe, Sr. Dr. Mari Alkatiri sei la-sai Primeiru Ministru iha tinan 20 ka 30 nia laran, enkuantu Timor-Leste presiza protesau husi lei forti no loloos nebe mak sei aplika ba governu hirak iha futuru nian nebe karik sira mos sei la-troka tan perspetivas ba malu, komitmentu, ka desizaun politika husi administrasaun atual ida ne'e. Ami mos la-konkorda katak nia mandatu nudar xefi governu RDTL nian ba oras ne'e bele extrai hotu kedas mina ho gas iha Timor-Leste, maibe se diak

Iu atu garanti katak regulamentus ba manajementu petrolifera iha tinan hirak mai sei proteje no forñese buat diak ba futuru jerasaun sidadaun Timor-Leste tomak.

Ami nia artigu hakerek konaba dependensia petrolifera asentua ba faktu katak pursentu 89 husi Timor-Leste nia Produtu Rai Laran Tomak (GDP) no pursentu 94 husi rendimentu governu nian nebe sei hetan husi mina no gas iha tinan 5 nia laran. Ami fiar ba Primeiru Ministru nia vizaun katak ida ne'e sei fo' o possibilidade ba Timor-Leste ekonomikamente nune'e mos politikamente bele indepedente. Hanoin hanesan mos ho Governu nian, mak *La' o Hamutuk* mos servisu tiha ona ba Timor-Leste hodi

bele maximiza benifisius hirak ne'e husi rekursus Tasi Timor nebe mak Australia reklama dehan ninian, maibe besik liu ba Timor-Leste.

Loos duni katak ema iha Timor-Leste laran hakarak mos hetan osan husi mina nian maibe husi servisu mak bele hetan, hanesan mos povu iha Nigeria, Ecuador, Kongo, Angola no nasaun hirak nebe mak produz mina hakarak. Ami espera katak governu Dr. Alkatiri nia esforsu, nebe hetan apoiu husi *La' o Hamutuk* no sociedadadi sivil, bele halo Timor-Leste susesu liu tan duke nasaun seluk, hodi atinji ba buat ne'e. Maibe ita labele subestima difikuldadi husi servisu hirak ne'e.

Pontus spesifikus balun husi Primeiru Ministru nia artigu nebe tenki hetan resposta

- Ami husu deskulpa ba sala nebe iha ami nia eskrita konaba Governu fo' o exempsaun ba kompañia iha artigu 21 nia laran katak sira la-anunsia publikamente – Primeiru Ministru loos iha pontu ne'e. Maibe, ami nia preukupa mak keta halo sira bele deside arbitrariamente livre no la-fo' o sai.
- Hanesan Primeiru Ministru hakerek katak, *La' o Hamutuk* husu no hetan Kontratu Fahe Hamutuk Produsaun (Production Sharing Contracts) Bayu-Undan nian, maski versaun nebe ami hetan (hanesan mos ida nebe mak tau iha website: www.transparency.gov.tl) iha paragrafu xavi 13 mak de propozitu halakon “*deliberately omitted*” (hakarak halakon). Ami mos husu beibeik konaba Kontratu Fahe Hamutuk Produsaun *Greater Sunrise* nian nebe mak asina tiha ona iha tinan hirak liu ba, maibe ami la-simu nomos la-tau iha website.
- Relasiona ba direitu konaba ema proprietariu rai privadu nian rezeita fasilidadis petrolifera nian, iha artigu 14.1 husi drafta Lei Petrolifera tinan 2004 nebe mak sirkula ba konsultasaun publiku dehan katak: “laiha ema ida mak bele ezerse nia direitu liu husi autorizasaun ruma ka liu husi lei ida ne'e:...(c) konaba proriadadi imovel ruma sein iha konsentimentu eskrita husi ema nain.” Maski Primeiru Ministru hakerek dehan ida ne'e viola Konstitusaun RDTL artigu 139, *La' o Hamutuk* fo' o hanoin ninia preokupasaun katak ema rai nain sira tenki iha direitu ba fasilidadis mak hanesan pipa, dalan, fabrika, ho fasilidadi seluk nebe mak uza hodi extrai mina maibe tau iha fatin la-hanesan iha rekursu nebe mak iha rai okos. Atu iha drafta ka iha diskusaun final ba Lei nian koalia konaba “konpensasaun nebe mak loloos no razoavel,” Ida ne'e husik hela ba Ministeriu Petrolifera mak bele disidi konaba saida mak justu no razoavel.
- Ami hakerek katak Lei Petrolifera ne'e la fo' o protesauun sufisiente ba meio ambiente. Regulamentu hirak nebe mak Primeiru Ministru mensiona ne'e seidak hakerek, no provavelmente mos karik sei labele lori ba konsultasaun publika ida mak hanesan halo tiha ona, halo revizaun fila fali no halo diskusaun parlamentaria hanesan Lei. Ami nia pontu prinsipal mak katak lei hirak ne'e la fo' o fatin ba publiku, halo revizaun fila fali ka halo konsultasaun konaba asuntus meio ambianti nian nebe mak besik ba area eskplorasaun. Laiha mekanizmu ba ema nebe mak laiha ministeriu laran bele lori problema meio ambianti ba atensaun autoridadi hirak nebe mak diferenti husi ema hirak nebe mak responsavel ba dezenvolve mina ne'e. Ami fo' o parabens ba governu ida ne'e tamba prepara dadaun atu hala'o avaliasaun konaba impaktu ba meio ambianti, no ami hein katak Governu hirak iha laron ikus mai sei foti medida hirak hanesan ne'e mos.
- Konaba halo konsultasaun ho komunidadadi lokal, de faktu katak Governu hala'o tiha ona esforsu maka'as hodi hanorin ema konaba benifisius husi dezenvolvimentu petrolifera ne'e nian. Ami fiar katak povu sira mos presiza aprende konaba riskus potensiais, nebe presiza hetan hodi halo desizaun didiak. Konsultasaun presija interkomunikasaun, katak ema nebe halo desizaun rona ba povu sira ninia ideas nune'e mos fo' o informasaun no resposta ba povu nia perguntas sira. Importante tebbebes mak katak komunidadadi sira mos presiza koalia konaba projetu nebe mak sei afeta direktamente ba sira. Ita bele haree rezultadu alternativa iha Aceh, Bougainville Nigeria ka Papua Oeste. ❖

Siapa di La' o Hamutuk?

Staf *La' o Hamutuk*: Maria Afonso de Jesus, Bella Galhos, Alex Grainger, Titi Irawati, Nugroho Kacasungkana, Yasinta Lujina, Inês Martins, Guteriano Nicolau, Charles Scheiner, Santana Soares

Penerjemah: Kylie, João Sarmento, Andrew de Sousa

Dewan Penasehat: Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, Pamela Sexton, Adérito de Jesus Soares

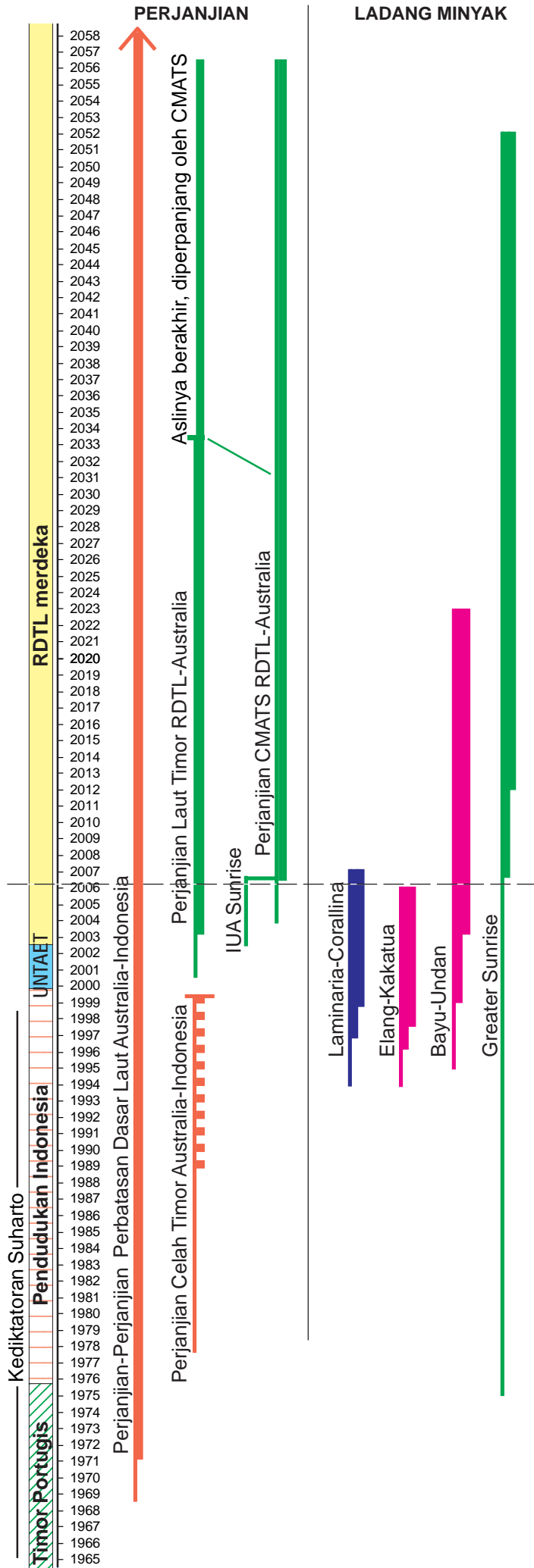


Diagram ini memperlihatkan bagaimana perundingan-perundingan dan proyek-proyek mengenai cadangan minyak di Laut Timor berhubungan dengan kejadian-kejadian sejarah, dimulai ketika Soeharto mengambil kekuasaan sampai dengan semua minyak dan gas di Laut Timor bagian Timor-Leste habis.

Kotak-kotak di atas menunjukkan **periode sejarah** – pemerintah Portugis, Indonesia, UNTAET, dan RDTL yang berkuasa di Timor-Leste. Ini diikuti dengan satu skala tahun, dari kiri ke kanan.

Rangkaian garis selanjutnya menunjukkan berbagai **perjanjian** yang dirundingkan antara Australia, Indonesia, dan Timor-Leste. Setiap garis dimulai di kiri ketika perundingan bermula. Garis ini menjadi semakin tebal setelah pengesahan, ketika perjanjian menjadi berlaku. Garis ini memanjang ke arah kanan selama perjanjian ini berlaku.

Dua perjanjian pertama dirundingkan antara Australia dan Indonesia tanpa peran serta Timor-Leste. **Perjanjian perbatasan** tahun 1972 berlaku tanpa batas waktu, dan **Perjanjian Celah Timor** tahun 1989 yang ilegal, direncanakan berlaku sampai tahun 2031, berakhir ketika Indonesia terpaksa keluar dari Timor-Leste pada tahun 1999.

Perjanjian Laut Timor tahun 2002, **Ketentuan Kelautan Tertentu dalam Perjanjian Laut Timor** (Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea Treaty – CMATS) tahun 2006, dan **Kesepakatan Penyatuan Internasional Sunrise** (Surise International Unitization Agreement – IUA) tahun 2003 ditandatangani oleh Aus-

tralia dan Timor-Leste. Walaupun Perjanjian Laut Timor akan habis masa berlakunya pada tahun 2033, ia telah diperpanjang sekurangnya sampai tahun 2056 oleh CMATS. CMATS (belum disahkan atau belum berlaku) dan Perjanjian Laut Timor akan terus berlaku sampai setelah produksi Greater Sunrise berakhir. IUA belum disahkan, meskipun dimasukkan dalam kesepakatan CMATS dan akan berlaku selama periode yang sama.

Rangkaian informasi berikutnya menunjukkan empat ladang minyak dan gas utama di bagian Laut Timor yang berdasarkan asas hukum internasional harus menjadi milik Timor-Leste. Masing-masing garis dimulai ketika ladang ladang ditemukan, menjadi semakin tebal setelah pengembangan dimulai, dan mencapai ketebalan maksimum ketika ladang ladang berproduksi.

- ◆ **Laminaria-Corallina** hasilnya seluruhnya diperoleh Australia, meskipun ladang ini lebih dekat ke garis pantai Timor-Leste daripada Australia.
- ◆ **Elang-Kakatua** dan **Bayu-Undan** berada di wilayah pengembangan bersama (JPDA – Joint Petroleum Development Area), dengan penghasilan hulu (ekstraksi) 90% untuk Timor-Leste dan 10% untuk Australia, yang mendapatkan semua penghasilan hilir (pemrosesan).
- ◆ **Greater Sunrise** sebagian berada dalam JPDA. Ketika mulai berproduksi beberapa tahun mendatang, Timor-Leste dan Australia akan berbagi hasil 50%-50%. Perusahaan-perusahaan belum memutuskan dimana memproses gas Sunrise, yang akan menentukan siapa yang mendapatkan penghasilan hilir. ❖

Deklarasaun pozisaun kona-ba situasaun atual Timor-Leste

Ho espiritu unidade nasional, Timor-Leste hetan ona ninian independensia neebe restaura iha 20 Maiu 2002. Hodi ukun-rasik-an nee Timor-Leste sei la fo tan fatin ba politika hafahe no ukun (*divide et impera*) neebe sai nuudar karakter kolonializmu no okupasaun. Maske nune, tan istoria naruk husi kolonializmu no okupasaun halo Timor-Leste mos hetan impaktu makaas husi forma politika hirak nee. Problema hirak neebe mosu iha loran balu liu ba iha Timor-Leste indika katak emar Timor-Leste mos sei susar atu hasees-an husi eransa kolonializasaun no okupasaun.

Istoria Timor-Leste rasik hatudu momoos katak politika *divide et impera* nee konseitu no pratika komun husi forsa kolonialista no okupante nee sai nuudar veneno no horok aat neebe la merese atu eziste iha Timor-Leste ohin loran. Tan nee politika no pratika divizionizmu neebe mosu iha deklarasaun hanesan "Ami Lorosae mak funu vs Imi Loromonu mak aproveita; firaku vs kaladi; funu-nain vs milisia; Aswain vs traidor" laos reflata espiritu unidade nasional neebe uluk sai nuudar forsa unifikante iha luta libertasaun nasional. Tan nee husi ohin ba oin, Timor-Leste neebe foun sei la bele iha tan "Ami-Imi" maibe iha deit mak "Ita" hotu neebe hamutuk iha Timor-Leste. Faktu istoriku hatudu katak komunidadade internasional hatene no valoriza duni unidade nasional emar Timor-Leste.

Nuudar sidadaun no foin-sae husi Timor-Leste neebe iha interese makaas ba progresu no dezenvolvimentu, ami — Asosiasaun Estudante Timor-Leste iha Estados Unidos Amerika —senti preokupadu tebes ho insidente hirak neebe mosu iha instituisaun F-FDTL. Tan nee, ami hakarak hatoo ami nian ezijensia no apelu ba:

1. Prezidente Republika

- ◆ Nuudar garantor unidade nasional tuir mandatu Konstituisional atu kontinua nafatin dialogu nasional neebe involve entidade no komponente tomak iha rai laran atu bele buka solusaun ba problema F-FDTL.
- ◆ Nuudar Komandante Supremu atu estabese Komisaun Independente ida atu investiga kazu 'loromonu-lorosae' neebe mosu iha instituisaun F-FDTL laran atu prosesa tuir regulamentu no lei neebe mak vigora iha Timor-Leste.

2. Governu RDTL

- ◆ Atu kaer metin nafatin mekanizmu dialogu hanesan dalan diak liu atu rezolve diverjensia politika neebe mosu dadaun iha rai laran hodi nune la bele hamosu tutan impaktu hirak neebe ikus mai bele sobu unidade nasional no harahun ukun-an neebe ita sosa ho mate, ran, terus no soin oioin.
- ◆ Atu hola medida hirak neebe justu no proporsional hodi restaura lalais lei no orden iha nasaun laran no mos fo protesau masimu ba populasaun, inklui populasaun sira nian propriedade privadu.
- ◆ Atu instituisaun lei no orden bele mantein nafatin prosesu demokratiku neebe respeita direitu ema nian no direitu fundamental sira seluk tan hodi nune bele restaura lalais fali situasaun paz no seguransa iha rai laran.
- ◆ Atu Ministeriu Defeza halo lei no kodiku militar neebe bele regula disiplina militar no garantia soldadu sira nian direitu fundamental.

3. Parlamentu Nasional

- ◆ Atu servisu hamutuk ho orgaun soberanu sira seluk hakerek lalais lei ida kona-ba anti-diskriminasaun neebe bazeia ba rasa, orientasaun seksual, religiaun, orijin, no estadu sosial iha instituisaun neebe deit iha Timor-Leste laran hodi nune bele asegura direitu ema hotu ba empregu, edukasaun, saude, moris hakmatek no selseluk tan.

4. Tribunal Supremu

- ◆ Atu kria mekanizmu legal hirak neebe nesesaria atu bele halakon tiha stigma etniku hanesan 'loromonu-lorosae' no 'firaku-kaladi' basaa buat hirak nee sai nuudar ameasa ba estabilidade nasional.

5. Instituisaun relijiozu no denominasaun seluk iha TL

- ◆ Atu instituisaun relijiozu no denominasaun seluk iha Timor-Leste, liliu ierarkia Igreja Katolika hola parte ativa iha prosesu reintegrasaun komunitaria hodi bele reforsa espiritu unidade nasional.

6. Sidadaun tomak

- ◆ Atu hakribit violensia no husik hela hahalok injustisa sira.
- ◆ Atu la bele fo tan fatin ba ema ka grupu ruma neebe buka sokar lia ka hafahe no halo atan tenik Timor oan basaa nasaun RDTL nee emar Timor-Leste nian hotu; laos individu, grupu, partidu ka regiaun ida nian.

Nuudar jersaun foun, ami fiar ho neon no laran tomak katak komponente hotu iha rai RDTL sei halao ninian obrigasaun moral atu dezenvolve RDTL ida neebe diak ba Timor oan hotu iha loran ohin no loran-aban-bainrua. Ami fiar katak komponente hotu iha Timor-Leste sei restaura hikas situasaun hakmatek iha populasaun nian leet.

Hawai'i, 3 Abril 2006

Álvaro Ribeiro, Prezidente

Berita Solidaritas Kuba dari India

Oleh Antero Benedito da Silva, Utusan untuk APRCSC dari Komite Timor-Leste-Solidaritas Kuba

“Dan suara-suara menentang imperialisme sedang berupaya untuk berpijak pada yang lemah...”

Solidaritas India dan Kuba menyelenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik untuk Solidaritas Kuba (APRCSC, Asia Pacific Regional Cuba Solidarity) yang ketiga di kota Chennai (dahulu Madras), Tamil Nadu. Tamil Nadu adalah salah satu kota yang paling padat penduduknya di India. Pada dasawarsa 1950-an, partai-partai politik di India dari semua ideologi bersama-sama mengirimkan bahan-bahan makanan ke Kuba sebagai dukungan kepada Fidel Castro dan perjuangan rakyat Kuba melawan rezim yang eksploitatif yang didukung oleh Amerika Serikat di Kuba pada saat itu. Konferensi tahun ini, sekali lagi, menegaskan kembali komitmen rakyat India untuk berjuang demi tujuan yang benar. Pemimpin terkemuka M. Karunanidhi bekas Ketua Menteri negara bagian Tamil Nadi selama tiga kali, menyatakan bahwa mempertahankan Kuba bukan hanya kewajiban rakyat Kuba sendiri. Ini adalah kewajiban semua orang yang bisa berpikir dengan benar di seluruh dunia. Kuba pernah dan masih menjadi simbol perjuangan untuk satu dunia yang baru, sebuah dunia yang adil bagi manusia.

Para peserta APRCSC datang dari 17 negara di wilayah Asia-Pacific, dari Selandia Baru sampai China, dari Sri Lanka sampai Jepang, yang mewakili organisasi-organisasi politik Marxis dan agama-agama. Dengan memperhatikan kerjasama Timor-Leste dengan Kuba, Timor-Leste mengirimkan seorang peserta ke konferensi solidaritas

antar rakyat itu yang berlangsung pada 20-21 Januari. Sebelumnya, pemerintah Timor-Leste telah mendesak diakhirinya blokade ekonomi terhadap Kuba di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konferensi ini mengutuk embargo oleh Amerika Serikat selama 46 tahun sebagai suatu “blokade yang kejam dan melanggar hukum”. Konferensi menetapkan 26 Juli sebagai “Hari Solidaritas Kuba” dan menyerukan teman-teman Kuba dan orang-orang yang berhati baik di seluruh dunia untuk merayakan hari solidaritas itu. Para peserta mendukung aksi-aksi di seluruh dunia oleh organisasi-organisasi politik, organisasi-organisasi buruh, petani, pekerja-pekerja pertanian, pemuda, perempuan, mahasiswa, intelektual, dan seniman untuk melawan imperialisme di bawah George Bush, dan meminta perubahan rezim di Amerika Serikat. Rakyat India berencana akan menyelenggarakan protes secara besar-besaran melawan George Bush selama kunjungannya ke India pada bulan Maret.

Karena kerjasama yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Timor-Leste, masyarakat sipil Timor-Leste seharusnya melanjutkan membangun Solidaritas Rakyat Timor-Leste dan Rakyat Kuba, secara aktif memajukan program pertukaran budaya dan berusaha meningkatkan kualitas solidaritas yang sedang berlangsung antara Timor-Leste dan Kuba. ❖

“Hasta La Victoria Siempre”

Dengarkan Program Radio “I gualidade” La’o Hamutuk

Wawancara dan komentar mengenai isu-isu penting yang kami pantau!

Setiap Minggu pada jam 1:00 siang di Radio Timor-Leste

Pelatihan Analisis Gender di Yogyakarta

Staf *La'o Hamutuk* Yasinta Lujina berpartisipasi dalam pelatihan analisis gender, yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia pada 23-29 Januari. Pelatihan yang diselenggarakan oleh NGO USC-Satunama yang berpusat di Yogyakarta itu, diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai kelompok keagamaan, NGO, kelompok media, akademisi dan organisasi-organisasi perempuan dari Indonesia dan Timor-Leste.

Tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam menganalisis gender dalam kerangka konseptualnya dan membekali peserta dengan metode analisis sehingga mereka bisa menerapkan metode-metode tersebut pada kerja mereka untuk pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan ini juga membekali peserta dengan pemahaman yang kritis tentang kondisi dalam mana hubungan-hubungan gender berlangsung dan dampak dari hubungan-hubungan ini.

Tindak lanjut dari pelatihan ini adalah pembentukan Gender Satunama Group, sebuah forum yang dirancang dan ditujukan untuk orang-orang yang telah mengikuti pelatihan yang sama. Di Timor-Leste, mereka yang tertarik dengan masalah ini bisa menghubungi Yasinta Lujina di *La'o Hamutuk*; di tempat lain silakan menghubungi Gender Satunama Group di gender_satunama@yahoo.co.id ❖



Audiensi Publik tentang Perempuan Penghibur pada Masa PD II

Perkumpulan HAK bekerjasama dengan Koalisi Jepang untuk Timor-Leste, menyelenggarakan audiensi publik selama dua hari tentang perbudakan seksual pada masa Perang Dunia II, di Aula Susteran Canossiana, Becora, Dili pada 6-7 Februari. Tujuan dari audiensi publik ini untuk mengungkapkan kebenaran tentang pendudukan militer kekaisaran Jepang di Timor Portugis, yang disertai dengan kejahatan-kejahatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan yang terkait dengan perang, termasuk perbudakan seksual paksa (*jugun ianfu*, *romusa*, dan *heiho*). Audiensi ini mendukung perempuan Timor,

terutama para korban dan keluarga mereka, untuk berbicara secara terbuka sehingga masyarakat Timor-Leste menjadi sadar tentang perbudakan seksual selama pendudukan Jepang pada 1942-1945.

Audiensi publik tersebut juga menampilkan diskusi panel dengan Uskup Goro Matsuura dari Osaka, Yasushi Higashizawa, seorang profesor hukum yang menjadi pengacara untuk kasus-kasus kekerasan seksual, anggota Parlemen Timor-Leste Lucia Lobato (PSD) dan Vicente Faria (Fretilin), dan Pastor Martinho Gusmão, Direktur Komisi Keadilan dan Perdamaian Diosis Baucau.

Para peserta dalam audiensi mendesak pemerintah Jepang untuk mengakui perilaku yang tidak berperikemanusiaan dan kejam dari tentara-tentara mereka selama Perang Dunia II. Para peserta meminta pemerintah Jepang untuk meminta maaf kepada para korban di wilayah yang saat itu bernama Timor Portugis, dan untuk membayar kompensasi kepada para korban perbudakan seksual.

Audiensi ini dilakukan setelah Perkumpulan HAK yang bekerjasama dengan Koalisi Jepang untuk Timor-Leste melakukan penelitian selama satu tahun. ❖



Para *survivor* perbudakan seksual Jepang memberikan kesaksian di depan umum. Dari kiri ke kanan: Virginia da Costa, Aniceto Neves (penerjemah), Mariana Araújo da Costa Marques dan Alicia Prego.

La'o Hamutuk

Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor Lorosa'e

1/1a Rua Mozambique, Dili, Timor Leste

Tel: +670-3325013 or +670-7234330

email: info@laohamutuk.org



Loron 17 Janeiru 2006

Ba: Excelentismo Sr. Prezidente da RDTL

Ami husi *Institusaun La'o Hamutuk* hakarek karta ne'e ba ita bo'ot hodi hato'o ami nia hanoin konaba Kodiku Penal nebe aprova hosi Governu Konstitusional RDTL, iha loron 6 fulan Dezembru 2005. Hanesan informasaun nebe mosu iha publiku katak, iha Kodiku Penal ne'e, iha Dekreitu Lei ida nebe konsidera defamasaun hanesan krime ida. Dekreitu lei ne'e hamosu diskusaun no insatisfeitu barak iha sosiedade Timorensen nia laran. *La'o Hamutuk* hatene katak oras ne'e dokumentu lei ne'e iha ita bo'ot nia liman hein para atu estuda no atu promulga.

Hanesan organizasaun sociedade sivil, nebe servisu bazeia ba prinsipu demokratiku no prinsipu direitus humanus, *La'o Hamutuk* mos la konkorda ho dekreitu lei ne'e. Tamba ne'e, ami ejiji no husu ba ita bo'ot hanesan prezidente da RDTL, atu hare fila-fali lei ne'e antes atu promulga. Tuir *La'o Hamutuk* nia observasaun, dekreitu ne'e la bele aplika bazeia ba razaun hirak tuir mai ne'e;

1. Dekreitu de Lei ne'e viola Konstitusaun RDTL, artigu 6 nebe koalia konaba objektivu estadu nian, artigu 40, nebe koalia konaba liberdade ba expressaun no informasaun no mos artigu 41, nebe koalia konaba liberdade ba imprensa no meius komunikasaun sosial seluk.
2. Dekreitu Lei ne'e viola Deklarasaun Universal Direitus Humanus nian, artigu 19, nebe fo garantia ba sidadaun hotu nia direitu ba liberdade no fo sai ninia hanoin no liberdade atu hetan informasaun. Timor-Leste mos ratifika tiha ona deklarasaun ne'e.
3. Dekreitu Lei ne'e viola Konvensaun Internasional ba Direitu Civil no Politiku nebe mos ratifika tiha ona hosi Governo RDTL.
4. Dekreitu de Lei ne'e hatudu inkomitmentu nasaun RDTL nian ba visaun 2020, nebe hateten katak atu promove liberdade ba imprensa.
5. Dekreitu Lei ne'e bele hamate kreatividade sociedade sivil nian no povu nian atu hato'o kritika no autokritika ba orgaun soberania iha Timor-Leste iha prosesu dezvoltamentu tomak.
6. Dekreitu lei ne'e viola prinsipu demokratiku no direitus humanus nebe nasaun foun ne'e esforsu-an atu promove prinsipu sira ne'e, hanesan nasaun demokraticu no direitus humanus.

Bazeia ba observasaun no razaun hirak nee, hanesan organizasaun sociedade sivil, ami hakarak ejiji ba Excelencia, Sr. Prezidente da Republica Timor-Leste atu uza ninia direitu nebe garantia iha artigu 85, pontu c, Konstitusaun RDTL, atu veto dekreitu lei ne'e, no husu ba Tribunal Rekursu atu bele halo sira nia apresiasaun ba lei ne'e, antes promulga.

Ami fiar katak ho ita bot nia kbit ne'e, sei halo desizaun nebe mak satisfaitu e justu ba ema hotu. No mos hatudu katak ita bo'ot respeita no iha komitmentu atu promove prinsipus demokrasia no direitu liberdade ba imprensa ba ema hotu atu partisipa iha prosesu dezvoltamentu pais ida ne'e.

Mak ne'e deit no obrigadu barak ba ita bo'ot ninia konsiderasaun, ami hein katak ita bo'ot sei foti desizaun nebe mak didiak ba povu hotu-hotu iha Timor-Leste.

Sinciremente,

Ines Martins ho Santana Soares
Reprezentante Tim La'o Hamutuk

komandan militer TNI membiarkan dan mendukung praktek-praktek tersebut, sehingga terjadi kekebalan hukum yang nyaris total bagi pelaku-pelakunya.

Hak anak sering dilanggar pada masa pendudukan melalui pembunuhan, pelanggaran seksual, penahanan dan penyiksaan, pemindahan paksa, dan perekrutan paksa untuk kegiatan militer Indonesia. Pola pelanggaran terhadap anak-anak mencerminkan pelanggaran yang dilakukan terhadap orang dewasa.

Rekomendasi CAVR mengenai keadilan sejalan dengan keinginan-keinginan yang disampaikan dalam kesaksian-kesaksian pada audiensi publik dan wawancara CAVR. CAVR merekomendasikan pembentukan pengadilan internasional, apabila semua langkah-langkah lain dianggap telah gagal memberikan keadilan yang memadai.

Kepada pemerintah Timor-Leste, CAVR merekomendasikan agar menyelenggarakan sebuah program reparasi untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling rentan. Bentuk-bentuk reparasi yang diusulkan mencakup kompensasi, pemulihan situasi sebelum terjadi pelanggaran, pemulihan medis dan psikologis, pemulihan martabat korban, dan tindakan-tindakan administratif dan hukum yang mencegah kembali terulangnya pelanggaran hak asasi manusia.

CAVR merekomendasikan kepada negara-negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara yang menjalankan program kerja sama militer dengan Indonesia selama pendudukan Timor-Leste, agar mereka meminta maaf kepada rakyat Timor Leste karena tidak menegakkan “hak asasi manusia dan hukum internasional yang wajib dilindungi dan ditegakkan oleh komunitas internasional.” Namun CAVR berpandangan bahwa pertanggungjawaban utama untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste ada pada pemerintah Indonesia.

Mengenai kebenaran dan keadilan, CAVR merekomendasikan agar kejahatan-kejahatan berat yang terjadi di Timor-Leste selama 1975-1999 yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik agar diselidiki oleh Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit – SCU) dan diadili oleh Panel Khusus Kejahatan Berat (Special Panel for Serious Crimes – SPSC) di Timor Leste. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memperbarui mandat dan meningkatkan sumberdaya kedua lembaga itu. Sebagian terbesar kejahatan dilakukan sebelum tahun 1999, tetapi “mendapatkan perhatian yang sangat sedikit” dari masyarakat internasional. CAVR juga merekomendasikan kepada masyarakat internasional agar mendesak Indonesia untuk bekerjasama dan meminta militer Indonesia untuk membuka semua informasi yang relevan untuk proses SCU dan SPSC.

Tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) oleh pemerintah Indonesia dan Timor-Leste, CAVR merekomendasikan agar kedua pemerintah menjamin komisi tersebut bekerja independen, tidak

memihak, dan obyektif serta membuat rekomendasi yang memadai, termasuk kemungkinan persidangan pidana lanjutan untuk para pelaku dan reparasi bagi para korban.

Kepada organ-organ PBB, khususnya Dewan Keamanan, CAVR merekomendasikan agar mereka terus mengikuti dari dekat perkembangan masalah keadilan dan agar bersiap untuk menetapkan pembentukan suatu pengadilan internasional jika langkah-langkah lain gagal memberikan keadilan.

La’o Hamutuk mendukung rekomendasi-rekomendasi CAVR, dan mendesak masyarakat internasional untuk melaksanakannya. Presiden Xanana Gusmão telah menyampaikan laporan akhir CAVR kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 20 Januari 2006, tetapi kami prihatin bahwa laporan ini belum diteruskan ke dalam sistem PBB. CAVR menyarankan agar laporannya diteruskan kepada Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan badan-badan PBB yang lain, supaya masing-masing badan-badan tersebut menyelenggarakan sidang khusus untuk mempelajari laporan tersebut dan mengambil pelajaran darinya. Pada 24 Maret sejumlah organisasi hak asasi manusia Timor-Leste dan internasional (termasuk *La’o Hamutuk*) menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, mendesaknya agar membagikan laporan CAVR kepada komunitas PBB yang lebih luas, sebagai bagian dari tanggungjawab PBB untuk mencapai cara-cara mengakhiri kekebalan hukum untuk kejahatan terhadap umat manusia selama pendudukan Indonesia.

Rekomendasi CAVR tersebut memperkuat tuntutan untuk pembentukan pengadilan yang bisa dipercaya dan independen untuk mengadili kejahatan terhadap umat manusia yang telah terjadi di Timor-Leste. Pemerintah Timor-Leste percaya bahwa geopolitik tidak memungkinkan pembentukan pengadilan internasional, dan lebih memilih menghindari peradilan demi kepentingan membangun “hubungan baik” dengan pemerintah Indonesia. Tetapi kejahatan-kejahatan yang terjadi di Timor-Leste sepanjang masa pendudukan Indonesia adalah “kejahatan terhadap umat manusia” yang merupakan pelanggaran berat hukum internasional, bukan semata-mata tindakan yang melanggar hukum nasional Timor-Leste ataupun Indonesia. Oleh karena itu, menyelenggarakan proses peradilan untuk kejahatan itu bukanlah semata-mata tanggungjawab Timor-Leste atau Indonesia, tetapi kewajiban masyarakat internasional seluruhnya.

Banyak dari rekomendasi dalam laporan akhir CAVR mencerminkan keinginan para korban dan saksi yang memberikan kesaksian. *La’o Hamutuk* berpandangan bahwa laporan ini harus secepatnya dipublikasikan secara luas di dalam dan luar Timor-Leste, dan rekomendasi-rekomendasinya dilaksanakan. Banyak korban telah menunggu lebih dari tiga puluh tahun agar kebenaran yang mereka alami diakui dan pihak-pihak yang bertanggungjawab diajukan ke pengadilan. Jangan sampai mereka menunggu lebih lama lagi. ❖

Editorial: Rekomendasi CAVR Perlu Diperhatikan

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação* – CAVR) telah menyelesaikan mandatnya. Satu laporan akhir telah disusun disertai dengan rekomendasi yang memberikan harapan bagi rakyat Timor-Leste yang menginginkan terwujudnya keadilan. *La'ó Hamutuk* mendukung rekomendasi CAVR walaupun dulu *La'ó Hamutuk* mengkritik proses yang dilaksanakan CAVR (baca *Buletin La'ó Hamutuk*, Vol. 4, No. 5, November 2003).

Secara resmi misi CAVR berakhir pada tanggal 31 Oktober 2005, dengan satu upacara penyerahan laporan akhir setebal 2.500 halaman dari Ketua CAVR Aniceto Guterres Lopes, SH kepada Presiden Republik Demokratik Timor-Leste Xanana Gusmão.

Tugas komisi adalah mencari kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia, menyelenggarakan rekonsiliasi komunitas, dan membuat rekomendasi. Ada dua bagian penting dalam laporan ini, yaitu temuan dan rekomendasi.

Selama menjalankan misinya, CAVR menemukan bahwa terjadi banyak jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berpola di Timor-Leste selama kurun waktu April 1974-Oktober 1999.

CAVR memperkirakan bahwa 102.800 orang sipil telah mati karena sebab-sebab yang terkait dengan konflik. Dari jumlah ini, 18.600 mati karena pembunuhan dan 84.200 mati akibat kelaparan dan penyakit. Kematian terbanyak terjadi dalam waktu delapan tahun pertama setelah invasi 1975, sementara sejumlah besar orang dibunuh pada tahun 1999. CAVR menemukan bahwa sebagian terbesar dari pembunuhan tidak sah dan penghilangan dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia.

CAVR menemukan bahwa pemindahan besar-besaran dilakukan berkali-kali oleh pasukan keamanan Indonesia. Sebagian besar penduduk Timor-Leste yang hidup sekarang sekurang-kurangnya mengalami satu kali pemindahan. Pemindahan paksa tersebut menyebabkan kerusakan besar pada perekonomian dan sering menyebabkan kematian.

Pelanggaran hak asasi yang tidak mematikan (berupa penahanan, penyiksaan, penganiayaan) juga seringkali terjadi. CAVR menemukan dua periode yang paling sering terjadi pelanggaran ini, yaitu segera setelah invasi 1975 dan pada tahun 1999. Meskipun pada kurun waktu 1985-1999 Timor Leste dianggap sebagai provinsi normal Indonesia, pada periode ini pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejadian sehari-hari.

CAVR menemukan bahwa pemerkosaan adalah bentuk pelanggaran seksual yang paling sering dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Pelecehan seksual, bentuk-bentuk lain pelanggaran seksual, dan perbudakan seksual juga sering terjadi. Komisi menemukan bahwa komandan-

(bersambung ke halaman 23)



Pada tanggal 17 Maret *La'ó Hamutuk* mengorganisir diskusi umum mengenai rekomendasi dari CAVR. Kiri ke kanan: Guterriano Nicolau (moderator), Komisaris CAVR José Estevão dan Pengacara Adérito de Jesus Soares.

Apakah *La'ó Hamutuk* itu?

La'ó Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor-Leste yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'ó Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Leste harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'ó Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor-Leste yang efektif. Selain itu, *La'ó Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor-Leste. Staf *La'ó Hamutuk* baik itu staf Timor-Leste maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, *La'ó Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor-Leste dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

La'ó Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. *Buletin* dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La'ó Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'ó Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor-Leste serta masyarakat internasional.